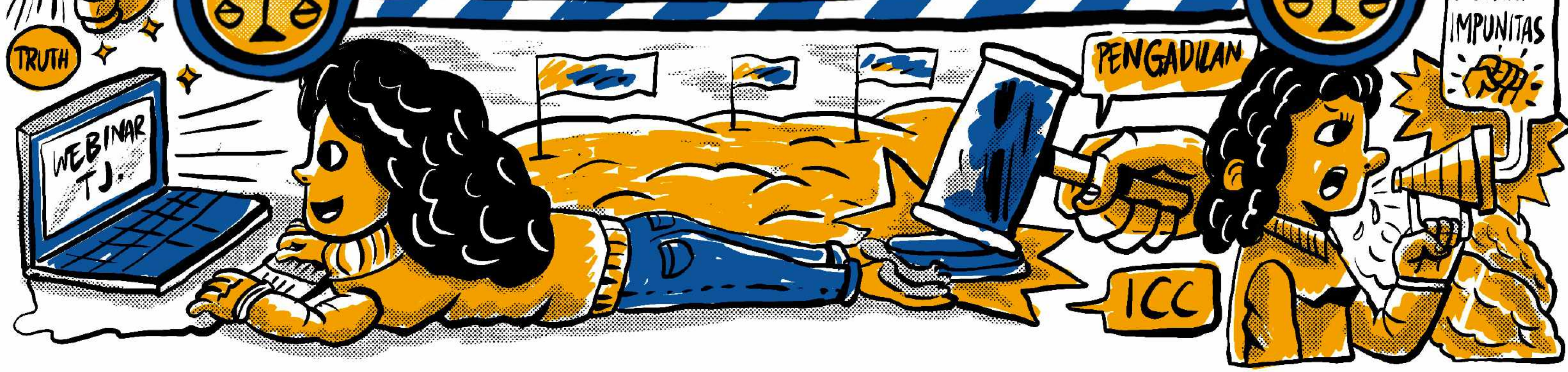




# KEADILAN TRANSISI



KKR

TRUTH



REFORM  
INST

JUSTICE

REPARASI

KOMISI  
KEBENARAN

PENGADILAN

ICC

MELAWAN  
IMPUNITAS





ASIA JUSTICE AND RIGHTS

Asia Justice and Rights (AJAR) adalah organisasi Hak Asasi Manusia regional yang bertujuan untuk memperkuat hak asasi manusia dan berkontribusi pada pengurangan impunitas yang mengakar di wilayah Asia Pasifik. Kerja-kerjanya berfokus pada negara-negara dalam transisi menuju demokrasi. Bekerja bersama dengan organisasi mitra di negara-negara ini, AJAR berupaya membangun budaya yang didasarkan akuntabilitas, keadilan dan kemauan untuk belajar dari akar penyebab pelanggaran Hak Asasi Manusia secara massal, untuk mencegah terulangnya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh negara. [asia-ajar.org](http://asia-ajar.org)



Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) adalah wadah pengajar Hak Asasi Manusia. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk memperkuat jaringan pengajar Hak Asasi Manusia di Indonesia, untuk berkontribusi pada dukungan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. [sepaham.wordpress.com](http://sepaham.wordpress.com)

TRANSITIONAL JUSTICE  
ASIA NETWORK

Transitional Justice Asia Network (TJAN) adalah jaringan organisasi masyarakat sipil di Asia, termasuk para praktisi dan akademisi dengan kepentingan bersama untuk membangun budaya akuntabilitas dan melawan impunitas. Strategi utama TJAN adalah menciptakan "lingkaran belajar" dimana para ahli negara memperdalam pengetahuan dan keterampilan mereka, mengembangkan strategi praktis, merumuskan kegiatan, dan mengumpulkan pelajaran dari seluruh wilayah untuk memastikan pembelajaran tersebar ke kelompok-kelompok terfokus.

[asia-ajar.org/transitional-justice-asia-network/](http://asia-ajar.org/transitional-justice-asia-network/)

# PENGANTAR

Pada masa periode pemerintahan otoriter dan penuh konflik, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) massal sering terjadi, dengan kebenaran yang ditutupi dan dimanipulasi. Setelah masa transisi dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan demokrasi, beberapa pelaku kejahatan dilindungi oleh kekebalan hukum (impunity). Dalam banyak kasus, para pelaku kejahatan tersebut tetap berkuasa dan menutup rapat apa yang pernah terjadi. Institusi-institusi yang seharusnya melindungi dan menegakkan hak-hak asasi manusia sangat lemah atau bahkan rusak. Untuk mewujudkan demokrasi yang bebas dan transparan, kebenaran tentang apa yang pernah terjadi harus dibuka, diselidiki dan disebarluaskan, pelaku kejahatan harus diadili, korban didampingi dan dihormati, serta hukum dan institusi harus direformasi untuk memastikan bahwa pelanggaran HAM massal tidak terulang kembali.

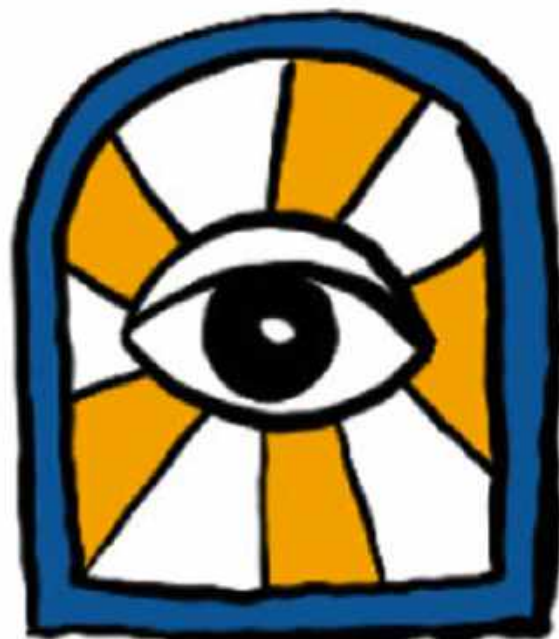
Kerangka kerja keadilan transisi adalah sebuah alat yang dapat membantu dalam mengembangkan dan menerapkan strategi efektif yang berhubungan dengan sejarah kejahatan massal. Kerangka ini terdiri dari empat pilar: pencarian kebenaran, menuntut mereka yang bertanggung jawab untuk diadili, membantu memperbaiki hidup dan martabat korban (reparasi), dan memberikan jaminan agar pelanggaran HAM tidak akan terjadi lagi (reformasi institusi). Unsur-unsur tersebut saling bergantung antara satu dengan lainnya, sehingga pendekatan harus dilakukan secara menyeluruh dan holistik. Inisiatif berbeda harus dilakukan secara berurutan agar pendekatan tersebut sesuai dengan konteksnya. Pendekatan sensitif seperti jender dibutuhkan untuk memahami bagaimana dampak kekerasan pada laki-laki dan perempuan berbeda dan menjamin keikutsertaan dari masyarakat yang rentan dan terpinggirkan

# KEADILAN TRANSISI

Sebuah rangkaian lengkap berupa proses dan mekanisme terkait dengan upaya masyarakat untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lampau, dengan tujuan untuk memastikan akuntabilitas, menyediakan keadilan dan mencapai rekonsiliasi. Proses dan mekanisme keadilan transisi merupakan suatu komponen yang penting untuk memperkuat aturan hukum yang berlaku (Panduan PBB tentang Keadilan Transisi)

## 4 JENDELA KEADILAN TRANSISI

HAK ATAS KEBENARAN



HAK ATAS KEADILAN



HAK ATAS PEMULIHAN



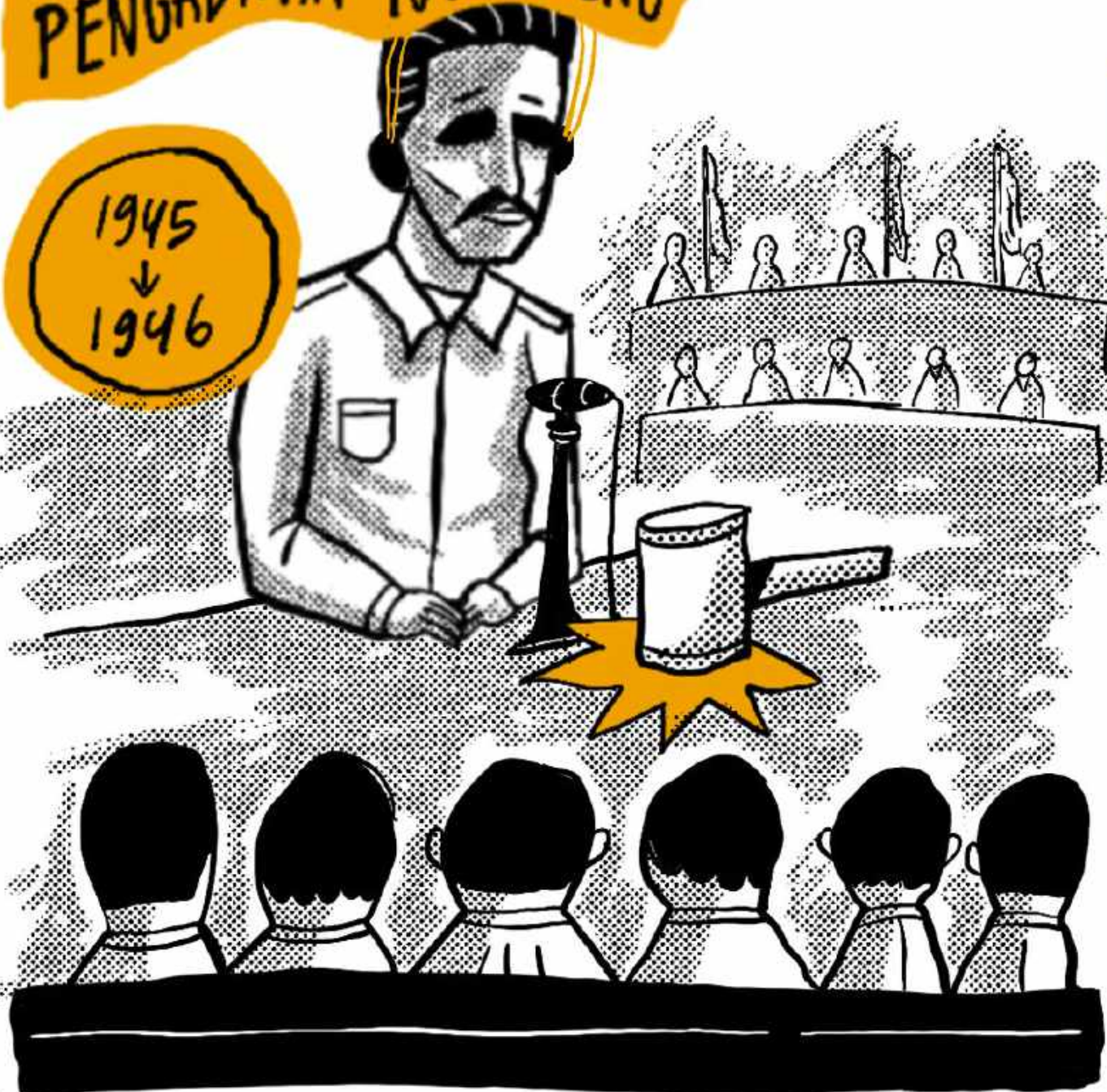
JAMINAN  
KETIDAKBERULANGAN



# KEADILAN TRANSISI

## PENGADILAN NÜRNBERG

1945  
↓  
1946



KEADILAN TRANSISI

4 JENDELA KEADILAN TRANSISI



GALUH WANDITA AJAR-TJAN

GOAL



BUTUH PROSES PANJANG BERBASIS KOMUNITAS UNTUK MENGATASI DAMPAK PELANGGARAN HAM DALAM SKALA MASIF.



MEMUTUS RANTAI IMPUNITAS



RANGKAIAN LENGKAP PROSES DAN MEKANISME UPAYA MASYARAKAT DENGAN DAMPAK PELANGGARAN SKALA BESAR (MASA LALU) HINGGA MENCAPI REKONSILIASI, SESUAI STANDARD INTERNASIONAL.

→ MEMASTIKAN AKUNTABILITAS



→ MENEGAKKAN KEADILAN



→ MENCAPI REKONSILIASI



JENDELA KEADILAN TRANSISI

- 1. KEBENARAN
- 2. PENUNTUTAN HUKUM



- 3. REPARASI

- 4. REFORMASI INSTITUSI



# Keadilan Transisi

## KEBENARAN

KOMISI KEBENARAN

JEPANG (2005-2005), TIMOR LESTE (2002-2005)



HASIL PERJANJIAN DAMAI  
14. 84.

1. NEPAL (2014) DAN KOMISI ORANG HILANG
2. MINDANAO, FILIPINA (2014)
3. ACEH (2016)
4. SRI LANKA LLRC (2010) DAN KOMPREHENSIF TJ (2016): KOMISI ORANG HILANG DAN REPARASI
5. THAILAND: TRCT (2011)



NEGARA INGKAR, MASYARAKAT SIPIL BISA AMBIL TINDAKAN

PENGUNGKAPAN KEBENARAN OLEH MASYARAKAT SIPIL:

- ASIA PASIFIK REGIONAL WOMENS HEARING, CAMBODIA
- TAHUN KEBENARAN, KKPK, INDONESIA
- INDONESIA PEOPLE TRIBUNAL KAJUS 1965, BELANDA

KOMISI KEBENARAN UNTUK INDONESIA



KESEMPATAN?

KESEMPATAN?

## 4 JENDELA Keadilan Transisi



GALUH WANDITA AJAR-TJAN

## PENUNTUTAN HUKUM



INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

## MENGADILI

1. GENSIDA
2. KEJAHATAN KEMANUSIAAN
3. KEJAHATAN PERANG

## PENGADILAN CAMPUR/HYBRID

- TIMOR LESTE
- KAMBOJA
- PENGADILAN NASIONAL INDONESIA
- BANGLADESH

## REPARASI



INDONESIA

- UU PENGADILAN HAM
- PUTUSAN PENGADILAN HAM TAMUNG PRIOK (1994)



- TIMOR LESTE
- TRUST FUNDS FOR VICTIM
- DUKUNGAN MENTRI PELAYANAN SOSIAL



ASIA

DI ASIA: REPARASI, KORUPSI DAN KOMPENSASI KERAP DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI PERDAMAIAN

## REFORMASI INSTITUSI

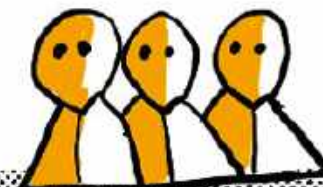


SEKTOR KEAMANAN

1. MENGUBAH BUDAYA INSTITUSI
2. MENJAMIN PELAKU TIDAK BERKARIR.

SEKTOR LAIN

SDA



KORUPSI



PENDIDIKAN



PERBURUHAN



PEMILIHAN UMUM



# KEADILAN TRANSISI

## 1 HASIL MOU HELSINKI, 2005

1. TRANSISI INDONESIA LEBIH MENGHORMATI HAM
2. KONVENSI HAK SIPIL POLITIK DAN KONVENSI HAK EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA
3. AYAT 2, PEMBENTUKAN PENGADILAN HAM ACEH
4. AYAT 3, PEMBENTUKAN KKR ACEH.

**KKR ACEH**

2007

SEHARUSNYA KKR ACEH SUDAH AKTIF BEKERJA, NAMUN TIDAK BISA BERJALAN EFEKTIF KARENA KURANG DUKUNGAN POLITIK.

KKR MENJADI KEWAJIBAN PEMERINTAH INDONESIA ATAU PEMERINTAH ACEH?

## 2

THE RIGHT TO BE ACKNOWLEDGE



UPAYA KKR ACEH DALAM PEMENUHAN Keadilan TRANSISI



**AFRIDAL DARMI**  
KETUA KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI KKR ACEH

## 4

PENGAMBILAN PERNYATAAN

TARGET 10.000 PUARA KORBAN

REALISASI 4.214 SUARA KORBAN

(KARENA SITUASI PANDEMI)

## 7

KKR	KOMNAS HAM	KKPK LPSK
1. PENGUNGKAPAN KEBENARAN	PENGADILAN TERHADAP TERDAKWA	MENDUKUNG HAK-HAK KORBAN
2. REPARASI		
3. REKONSILIASI		

## 8 TRANSISI Di ACEH.

1. KONFLIK BERSENJATA MENJADI LEBIH AMAN DAN DAMAI
2. REZIM YANG TIDAK PRO MENJADI PRO HAM DAN HAK-HAK KORBAN DITINGKAT NASIONAL SETELAH '98.

## 6. REKONSILIASI

UPAYA MENDORONG REKONSILIASI ACEH TENGAH + BENER MERIAH (CANTAK KELOMPOK DI WILAYAH BERAGAM)

## 5

REPARASI

27 MEI 2020

PENGAJUAN 245 NAMA  
↓  
REKOMENDASI REPARASI MENDESAK DITERIMA PEMERINTAH ACEH.

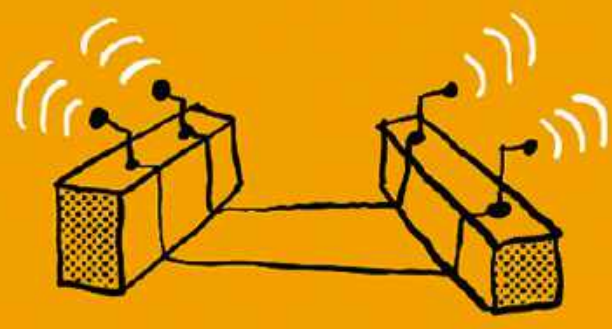
RENCANA OKTOBER 2021

245 NAMA MENERIMA REPARASI MENDESAK

REPARASI MENDESAK: MEDIS, PSIKOLOGIS, MODAL USAHA, JAMINAN HIDUP, STATUS KEPENDUDUKAN

## 3 ((( ? )))

# DENGAR KESAKSIAN

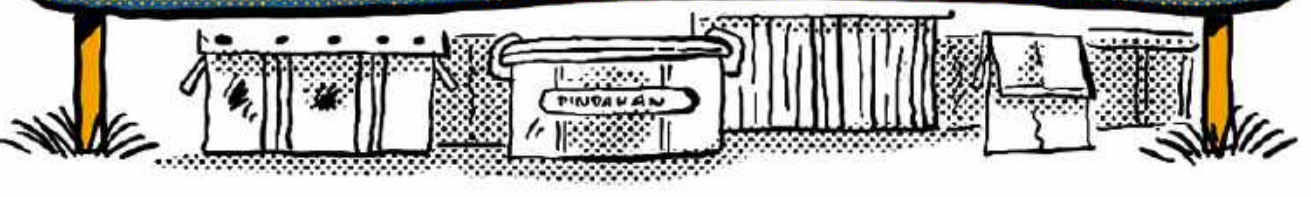


1. NOVEMBER 2018  
TEMA: KEKERASAN, PENYIKSAAN KEKERASAN VISUAL, KERUSAKAN BENDA.
2. JULY 2019  
SISI EKONOMI, BUDAYA, SOSIAL, POLITIK WILAYAH ACEH UTARA
3. NOVEMBER 2019  
KELUARGA KORBAN PENGHILANGAN PAKSA.

# KEADILAN TRANSISI

## 1. Keadilan Transisi

1. Pencarian Keadilan dari Regim Otoritarian Menuju Demokrasi
2. Apa itu Masa Transisi? Mulai? Berakhir?
3. Masa Lalu? Regim Otoritarian
4. Bagaimana Negara Melarang?



## 2. MEKANISME Keadilan Transisi

1. Pengadilan HAM
2. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

## 3.



1. Mengarusutamakan Keadilan Transisi
2. Tekanan kepada Pemerintah
3. International People Tribunal.

## 6



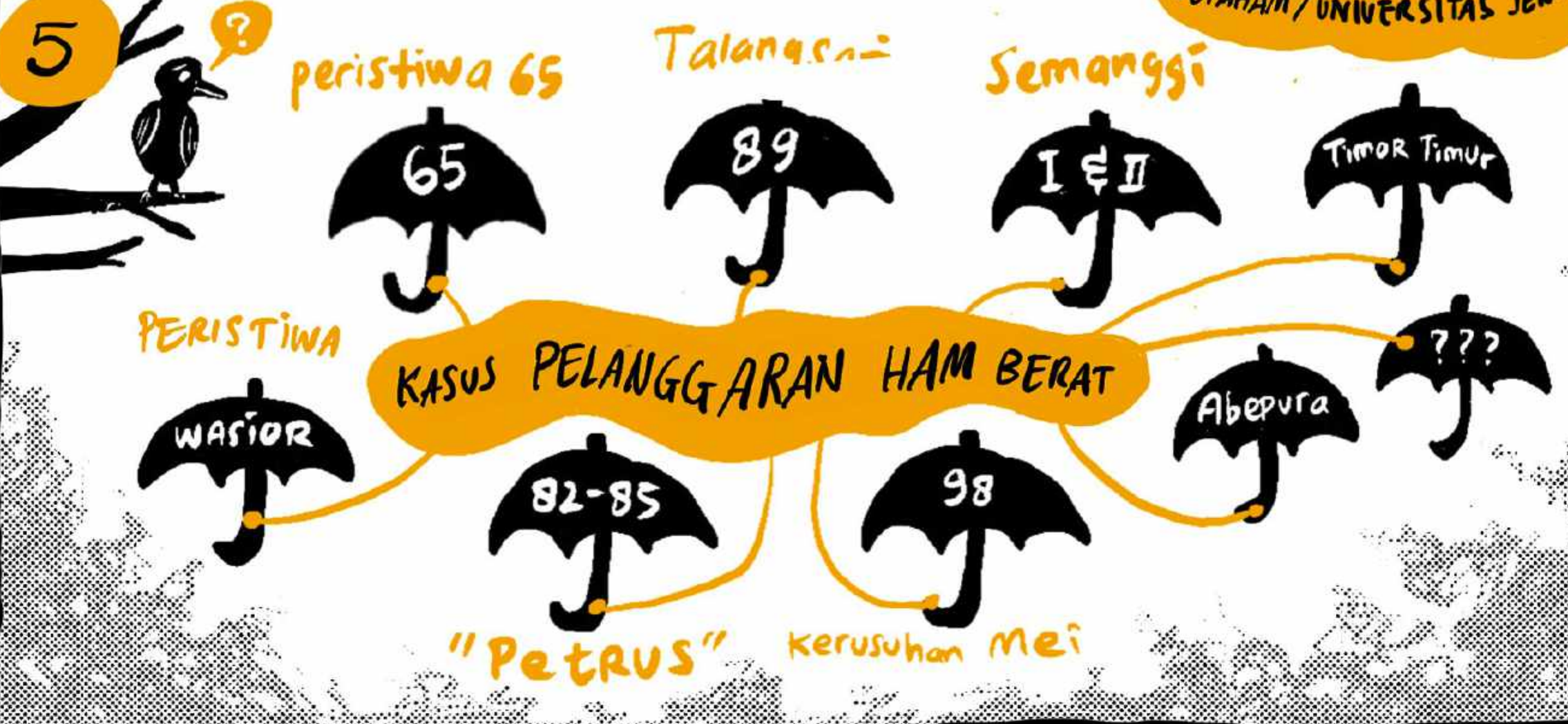
1. Pemerintah Konstitusional?
2. Prinsip Hukum?
3. Kesetaraan di Muka Hukum?
4. Negara yang menghormati, melindungi, dan memenuhi hak?

## KEADILAN TRANSISI SETELAH 20 TAHUN REFORMASI



MAMUNGAL K. WARDAYA  
SEPAHAM / UNIVERSITAS JENRAL SUDIRMAN

## 5



## 4



PENTINGNYA PENYELESAIAN

1. MEMOTONG RANTAI IMPUNITAS
2. MENEGAH TERULANGNYA PELANGGARAN HAM BERAT
3. KEADILAN BAGI KORBAN DAN KELUARGA.

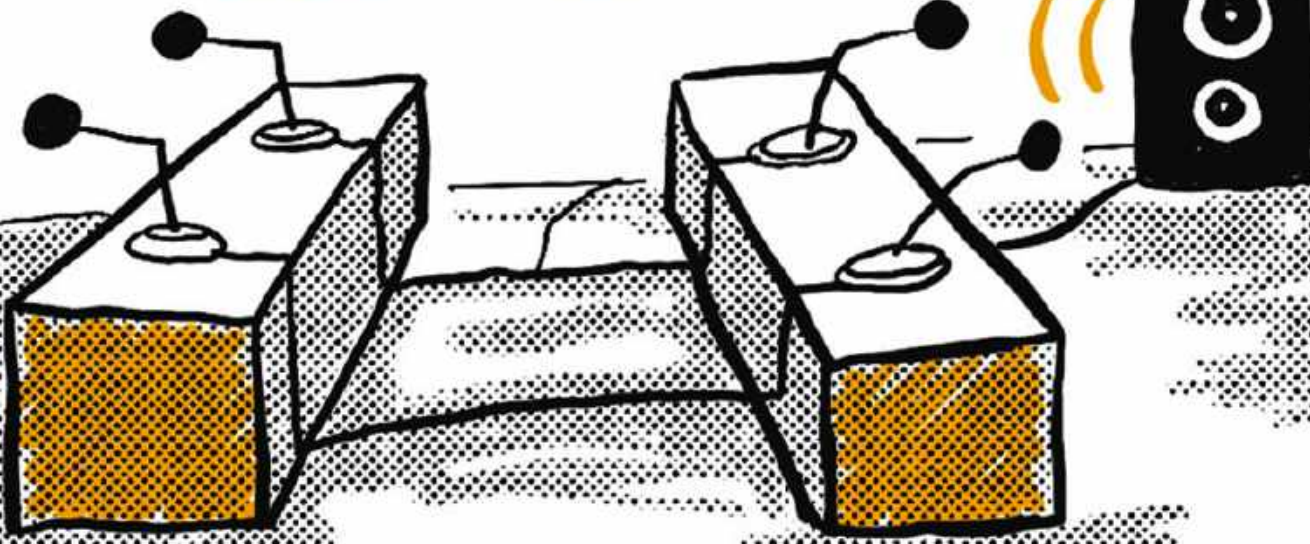


# KEBENARAN

## METODE

1.

### DENGAR KESAKSIAN

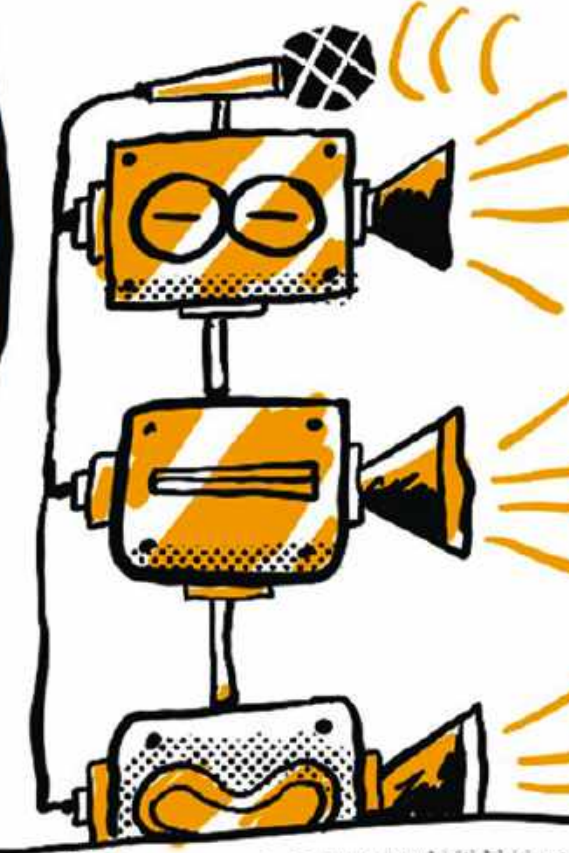


HAK ATAS KEBENARAN:  
URGENSI  
dan  
MEKANISME PENEGAKAN

## FUNGSI

2.

### PENGAMBILAN PERNYATAAN



1. KLARIFIKASI
2. MENANGGAPI KEBUTUHAN
3. KONTRIBUSI UNTUK KEADILAN
4. REKOMENDASI REFORMASI
5. PROMO REKONSILIASI

5.

### ISU PENGUATAN

1. MERESPON KEPENTINGAN DAN KEBUTUHAN KORBAN.
2. MEMILIH KOMISIONER YANG TRANSPARAN DAN PARTISIPATIF
3. TUGAS DAN FUNGSI DIJALAKAN SECARA EFEKTIF

1. JARINGAN → EFEKTIFITAS.



4.



MUKTIYONO  
SEPAHAM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

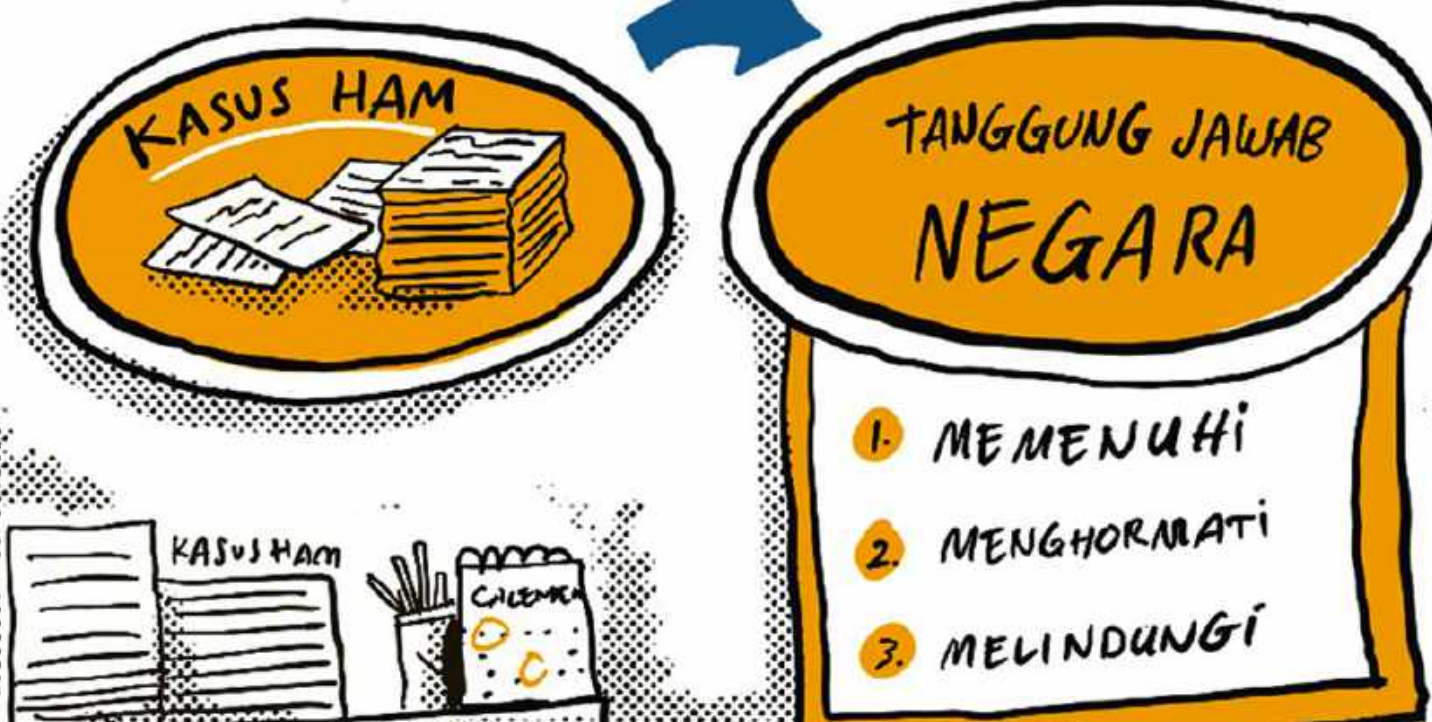


MEKANISME IMPLEMENTASI  
NASIONAL → ~~UU-29  
2004~~ → DIBATALKAN  
↓  
QANUN KKRA

3.



1. TANGGUNG JAWAB PELAKU
2. PERDEBATAN ISU PUBLIK
3. PLATFORM PUBLIK BAGI KORBAN
4. REPARASI
5. REFORMASI HUKUM INSTITUSI
6. REKONSILIASI
7. TRANSISI DEMOKRASI



HAK ATAS KEBENARAN:  
URGENSI dan MEKANISME PENEGAKAN



MUKTIYONO SEPAHAM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

## 7 SCOPE INFORMASI KEBENARAN

1. PENYEBAB TIMBULNYA KORBAN
2. PENYEBAB PELANGGARAN BERAT
3. KEMAJUAN DAN HASIL INVESTIGASI
4. ALASAN TERJADINYA BERDASAR HUKUM INTERNASIONAL DAN PELANGGARAN HAM BERAT.
5. LOKASI PELANGGARAN
6. NASIB DAN LOKASI KORBAN
7. IDENTITAS PELAKU

## 11. MEKANISME IMPLEMENTASI DOMESTIK: INISIATIF NEGARA

1. KOMISI KEJAHRAH DAN HAM
2. KOMISI ORANG HILANG
3. KOMISI PENYELIDIKAN
4. KOMISI KEBENARAN

## 10 MEKANISME IMPLEMENTASI DOMESTIK. INISIATIF MASYARAKAT SIPIL.

1. REHMI, GUATEMALA
2. DC, CAMBODIA
3. MUSEUM PERANG, BANGLADESH
4. KKR GRENSBORO, AS (2004)

## 9 KOMPONEN MEKANISME

1. ATURAN
2. LEMBAGA
3. PROSEDUR

## 8 MEKANISME IMPLEMENTASI HAK ATAS KEBENARAN



PEOPLE TRIBUNAL

# KEBENARAN

1. APA DAN BERAPA KOMISI KEBENARAN DI DUNIA?



1970-2010 → **37**

KOMISI KEBENARAN

KOMISI KEBENARAN DATABASE

1. SEMENTARA
2. DIRESMIKAN NEGARA
3. INVESTIGASI
4. MASA OPERASI JELAS
5. SELIDIKI POLA PELANGGARAN

## KOMISI KEBENARAN



SRI WAHYUNINGROEM  
UPN VETERAN JAKARTA - TJAN

PEOPLE TRIBUNAL

1. TOKYO (1999-2000)
2. BIAK BERDARAH (JULI, 1998)
3. INTERNATIONAL PEOPLE TRIBUNAL (DEN HAAG, 2015)

KRITIK: KURANGNYA PENGAKUAN ATAS KERJA-KERJA MASYARAKAT SIPIL.

PRISCILLA HAYNER

1. INVESTIGASI KEJAHATAN HAM
2. Mencari pola kejahatan HAM
3. BERSIFAT SEMENTARA
4. LEMBAGA RESMI NEGARA

BISHNU PATHAK

1. KOMISI PENGHILANGAN PAKSA
2. KOMISI KEBENARAN DAN DEMOKRASI
3. KOMBINASI: PENGADILAN
4. LAINNYA TERKAIT DENGAN PENGUNGKAPAN FAKTA.

2. PENUTUTAN DAN REPARASI

MANDAT



1. PENYELIDIKAN AKAR KASUS

2. PENGUNGKAPAN KEBENARAN

3. KEBENARAN DAN REKONSILIASI

TUJUAN: PENGUNGKAPAN KEBENARAN REKONSILIASI

STRUKTUR LAPORAN KOMISI KEBENARAN

1. POLA KEKERASAN
2. AKAR MASALAH
3. DAMPAK
4. KORBAN

LEBIH COCOK UNTUK KONFLIK HORIZONTAL

PEMERINTAH + REKONSILIASI IMPUNITAS

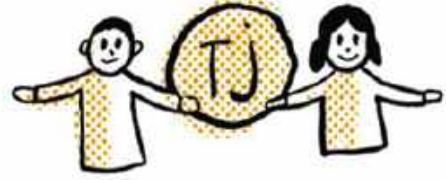
PISAU BERMATA DUA

FORGET

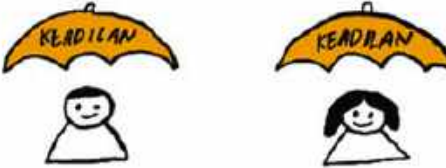
FORGIVE

6 MENYICIL KEADILAN

1. MENJAGA NORMA KEADILAN TRANSISI



2. "KEADILAN" BAGI MASYARAKAT AKAR RUMPUT (LEVEL REGIONAL DAN NASIONAL)



3. DOKUMENTASI, MEMORIALISASI, PERINGATAN, DAN REKONSILIASI



5. PERAN MASYARAKAT SIPIL

1. MENGINISIASI



2. MENGADVOKASI



3. MEMBENTUK



4. DAMPAK KOMISI KEBENARAN

KOMISI KEBENARAN & DEMOKRASI

DEMOKRASI + DEMOKRATISASI

KOMBINASI

PERCOBAAN + AMNESTI

PERCOBAAN + AMNESTI + KOMISI KEBENARAN



PENGAKUAN & KEADILAN SEJARAH

INDIVIDUAL VS KOLEKTIF

# PENUNTUTAN

1.

## SEJARAH



PIDANA INTERNASIONAL UNTUK KEJAHATAN SERIUS HAM

PENGADILAN MILITER INTERNASIONAL

KASUS KEJAHATAN SERIUS SETELAH PD II (NUREMBERG DAN TOKYO)

PENGADILAN PIDANA INT. (AD-HOC)

UNTUK BEKAS JAJAHAN YUGOSLAVIA (1993) DAN RWANDA (1994)

PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL (PERMANEN) (2002)

2.

KEJAHATAN SERIUS HAM / PELANGGARAN HAM BERAT



## GENOSIDA

MEMUSNAHKAN KELOMPOK BANGSA, RAS, KELOMPOK ETNIS, KELOMPOK AGAMA.



## KEJAHATAN PERANG

KONFLIK / SENGGETA BERSENJATA INTERNASIONAL / NON INTERNASIONAL



PENUNTUTAN DAN PENGADILAN PIDANA UNTUK KEJAHATAN INTERNASIONAL

## KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN

SERANGAN MELUAS & SISTEMIK DITUJUKAN UNTUK MASYARAKAT SIPIL.



## AGRESI

PENGUNAAN ANGKATAN BERSENJATA OLEH SUATU NEGARA YANG TIDAK SEPAI DENGAN PIAGAM PBB



3

MODEL PERADILAN PIDANA KASUS KEJAHATAN SERIUS HAM.

1. PENGADILAN INTERNASIONAL (AD-HOC)
2. PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL / ICC
3. PENGADILAN CAMPURAN (HYBRID)
4. PENGADILAN NASIONAL

6.

## PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA

1. PERISTIWA 1965
2. PETRUS 1982-1985
3. TALANGSARI 1989
4. TRISAKTI, SEMANGGI SEMANGGI II
5. KERUSUHAN MEI '98
6. PENGHILANGAN PAKSA AKTIVIS 97-98
7. SIMPANG KEA-ACEH
8. RUMOH GEUDONG
9. DUKUN SANTET BANYUWANGI

1. WASIOR PAPUA
2. WAMENA PAPUA
3. PANIAI PAPUA
4. JAMBO KEUPOK-ACEH

1. TANJUNG PRIK (1984)
2. TIMOR TIMUR (1999)
3. ABEPURA (2000)

PELANGGARAN HAM BERAT SEBELUM UU 26 THN 2000

PELANGGARAN HAM BERAT SETELAH UU 26 TAHUN 2000

YANG SUDAH DISIDANG MELALUI PENGADILAN HAM

5

SEJARAH PROSES PENUNTUTAN DAN PENGADILAN HAM DALAM KEADILAN TRANSISI di INDONESIA

PUTRI KANESIA (TJAN-KONTRAS)

UU NO-26 TAHUN 2000

MENGATUR:

KEJAHATAN KEMANUSIAAN



GENOSIDA



PRINSIP

1. RETROAKTIF
2. NEBIS IN IDEM
3. COMMAND RESPONSIBILITY



4



SEDJAK 2002

## MANDAT ICC

- KOMPLEMENTER MELENGKAPI PROSES PIDANA DI NEGARA
- HANYA MENGADILI JIKA NEGARA TIDAK MAU DAN TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN PENYELIDIKAN
- NON RETROAKTIF
- KEANGGOTAAN BERSIFAT SUPARELA (ADA HAK VETO)

# PENUNTUTAN

7

**TIMOR TIMUR (2002)**  
 18 TERDAKWA PASUKAN KEAMANAN  
 GAGAL MENDAPAT BARANG BUKTI  
 6 TERDAKWA, 10 TAHUN VONIS  
 2 TERDAKWA YANG DIMUKUM  
 PUTUSAN BANDING PUTUSAN KASASI  
**BEBAS**

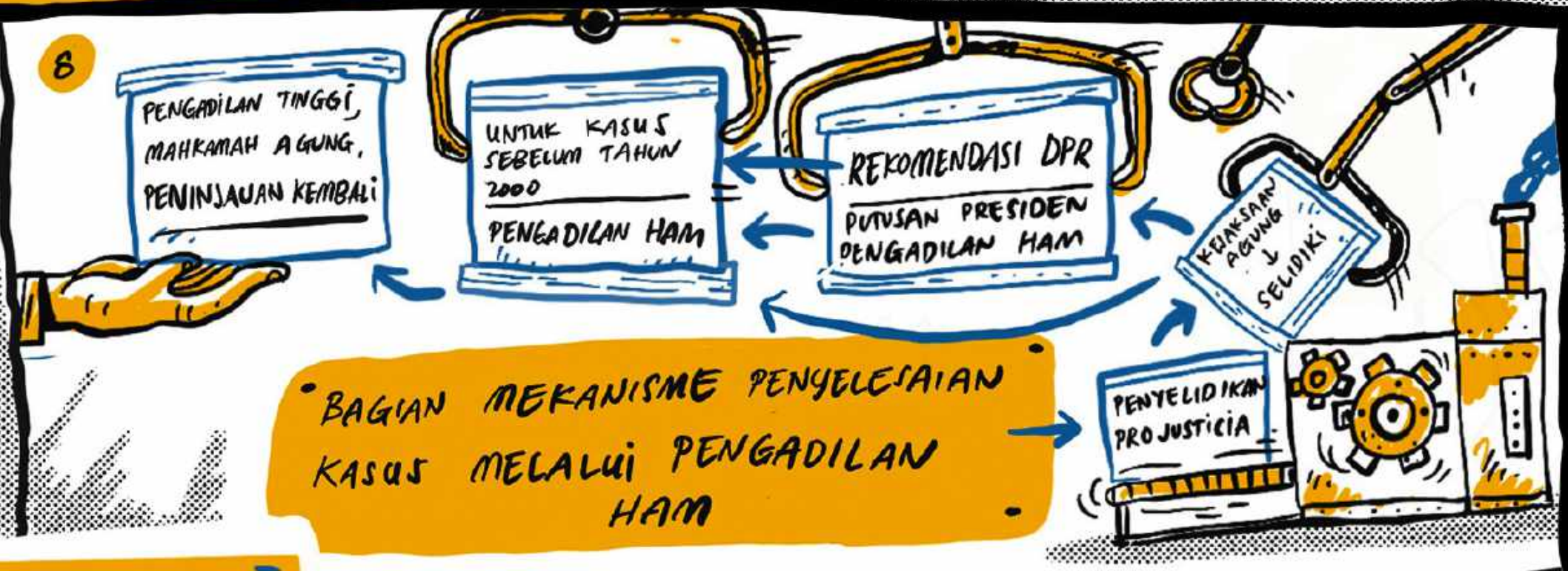
**TANJUNG PRIOK (2003)**  
 14 PENSIUNAN & PERSONEL AKTIF MILITER  
 GAGAL, KARENA ADA INTIMIDASI PASIFAN MILITER  
 12 TERDAKWA 2-3 TAHUN  
 PUTUSAN BANDING BEBAS KOMPENSASI DITOLAK  
 PUTUSAN KASASI KOMPENSASI DITOLAK

**ABEPURA (2004)**  
 2 TERDAKWA DARI APARAT KEPOLISIAN  
 SAKSI LOKASI JAUH BAKUWAAN JPU LEMAH  
 BEBAS  
 PUTUSAN BANDING BEBAS  
 PUTUSAN KASASI

**PENGADILAN HAM DI INDONESIA**

**PENUNTUTAN DAN PENGADILAN PIDANA UNTUK KEJAHATAN INTERNASIONAL**

8



11

MUNGKINKAH KASUS PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA UNTUK DIADILI??  
 ????  
 YA!  
 (PENGADILAN NASIONAL HAM AD-HOC)  
 PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL

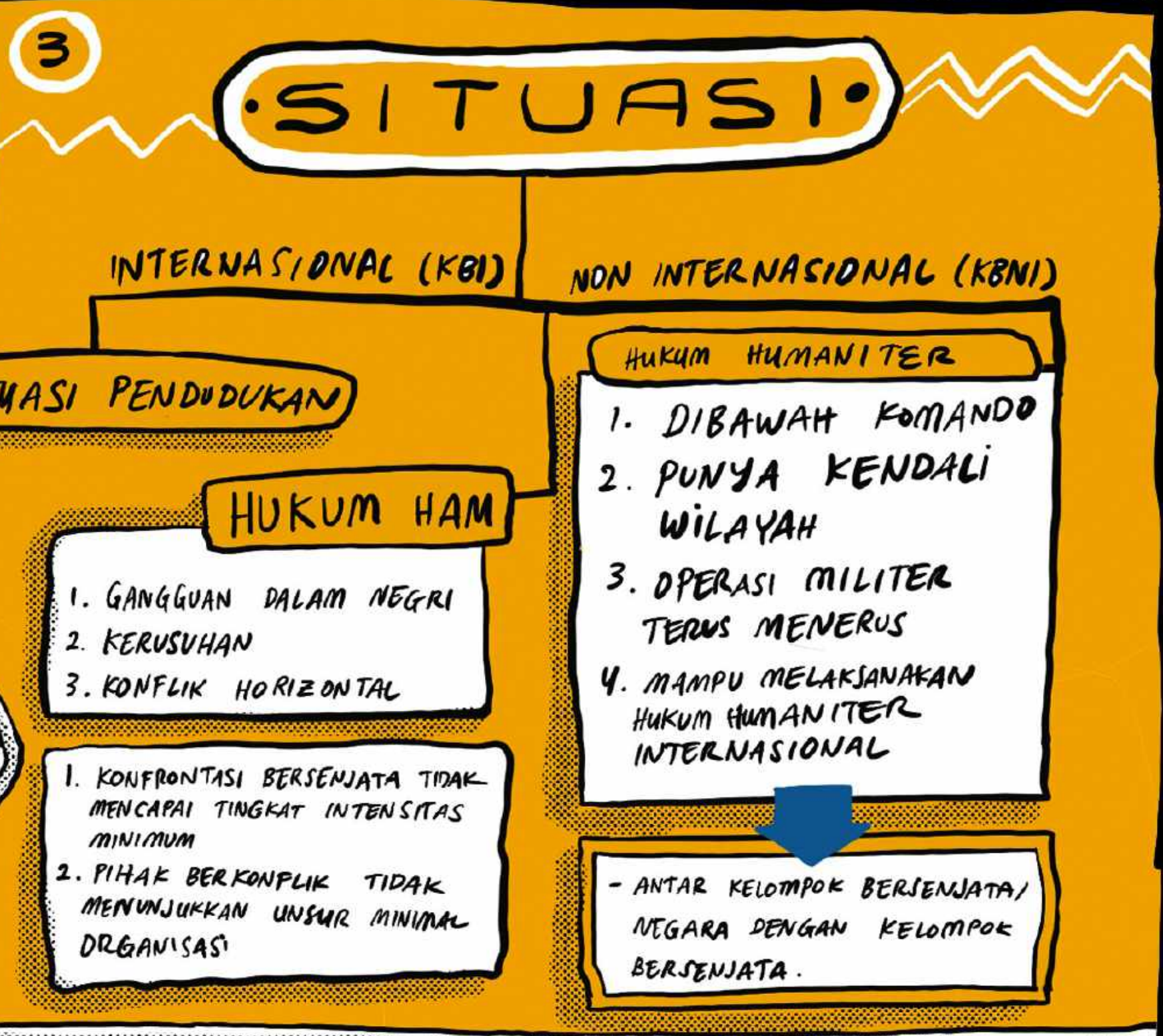
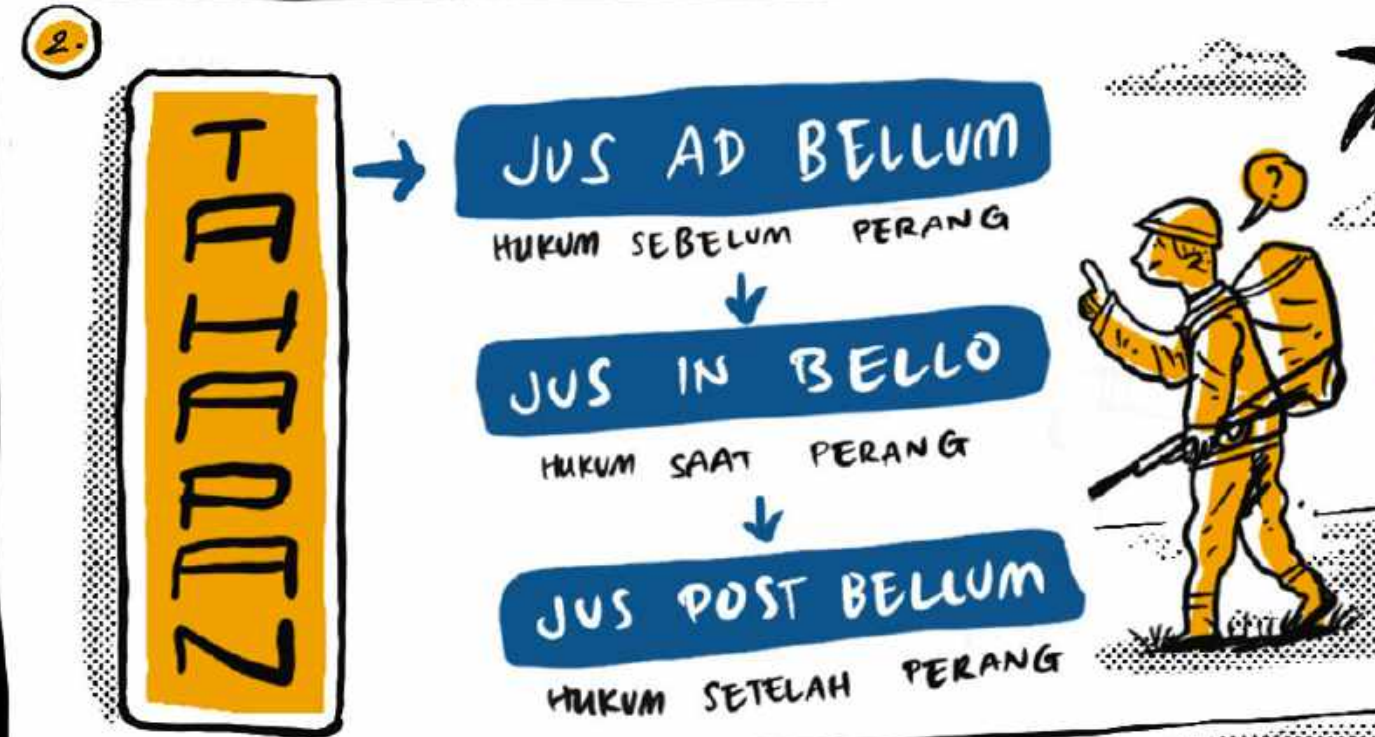
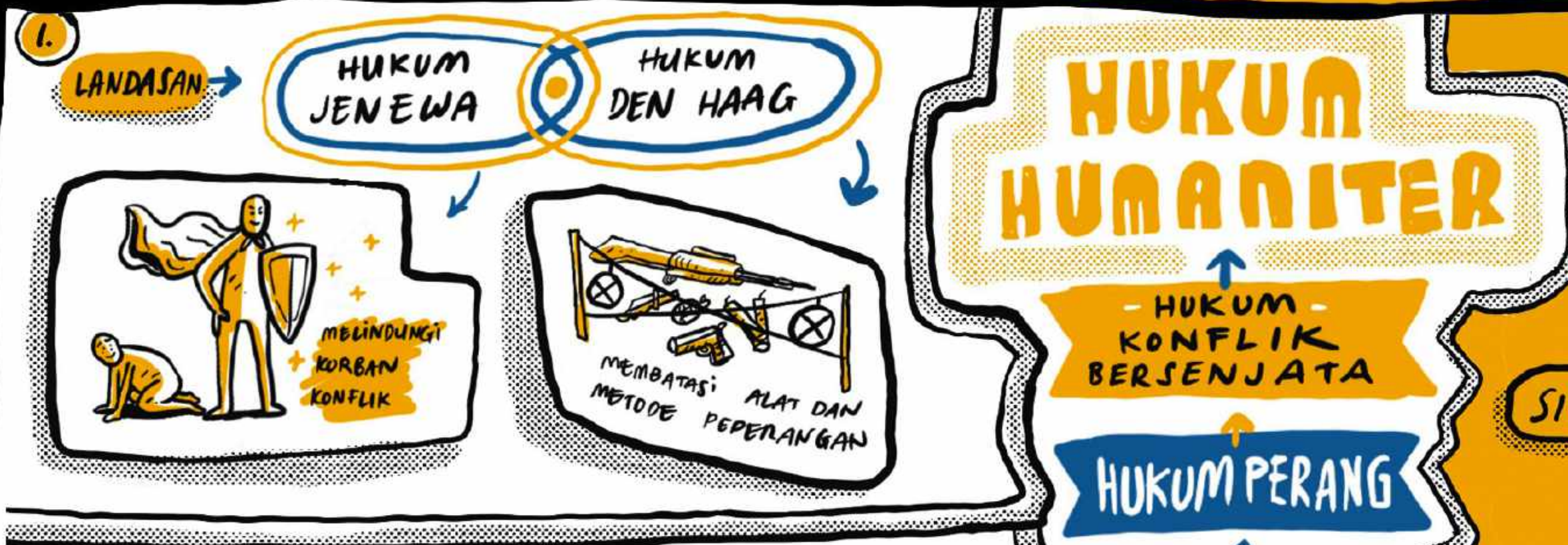
10



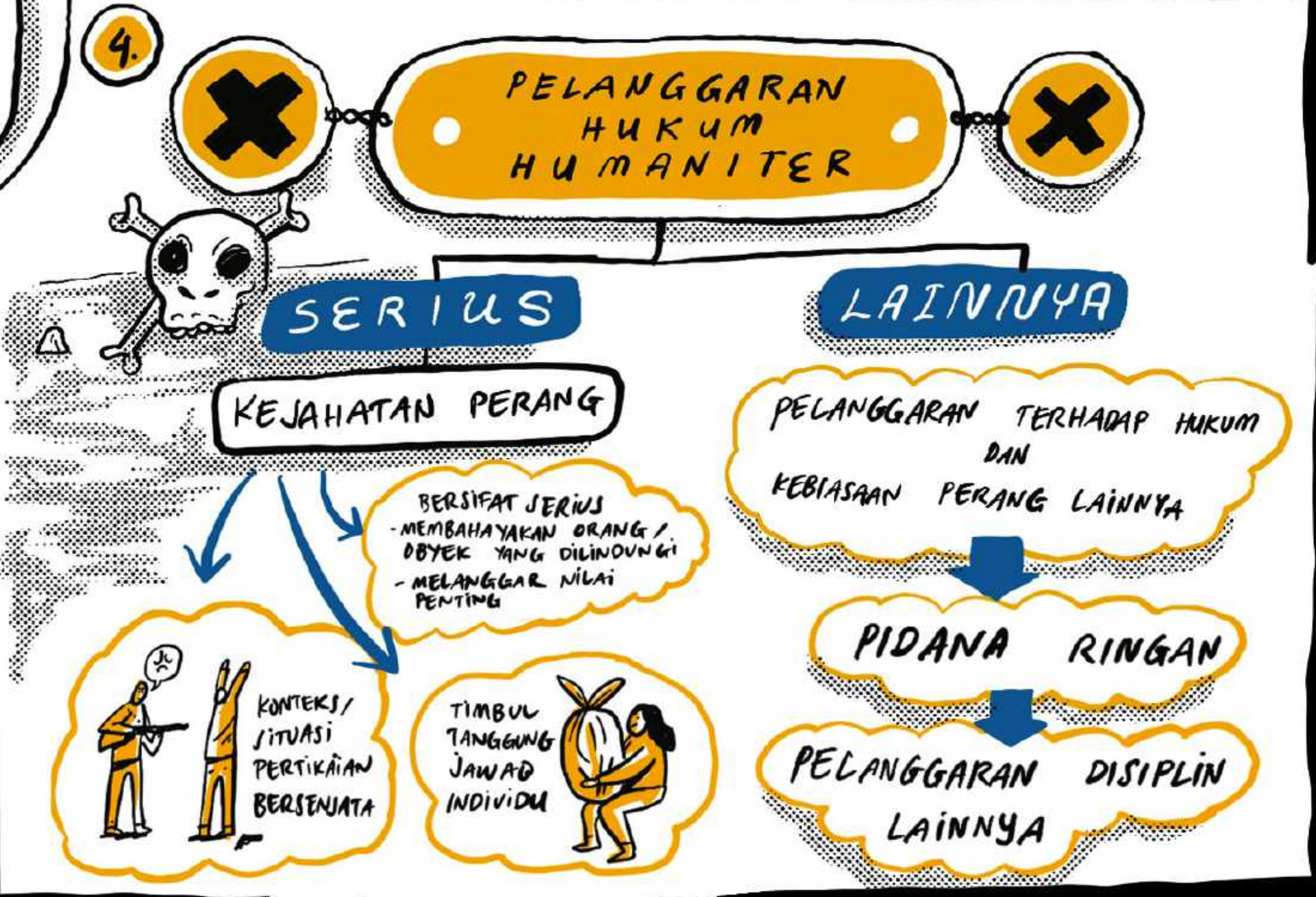
9



# PENUNTUTAN



5. PENEKAKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
- HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL ADALAH HUKUM, BUKAN MORALITAS
  - MENCEGAH PENGULANGAN, EFEK JERA PELAKU
  - MEMUTUS IMPUNITAS
  - MEMBERI RASA KEADILAN KE MASYARAKAT DAN KORBAN
  - MENINGKATKAN KREDIBILITAS HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
  - MENCEGAH BERLARUTNYA KONFLIK



6. MENGAPA MEKANISME INTERNASIONAL DIPERLUKAN?

MEMUTUS PRAKTEK IMPUNITAS

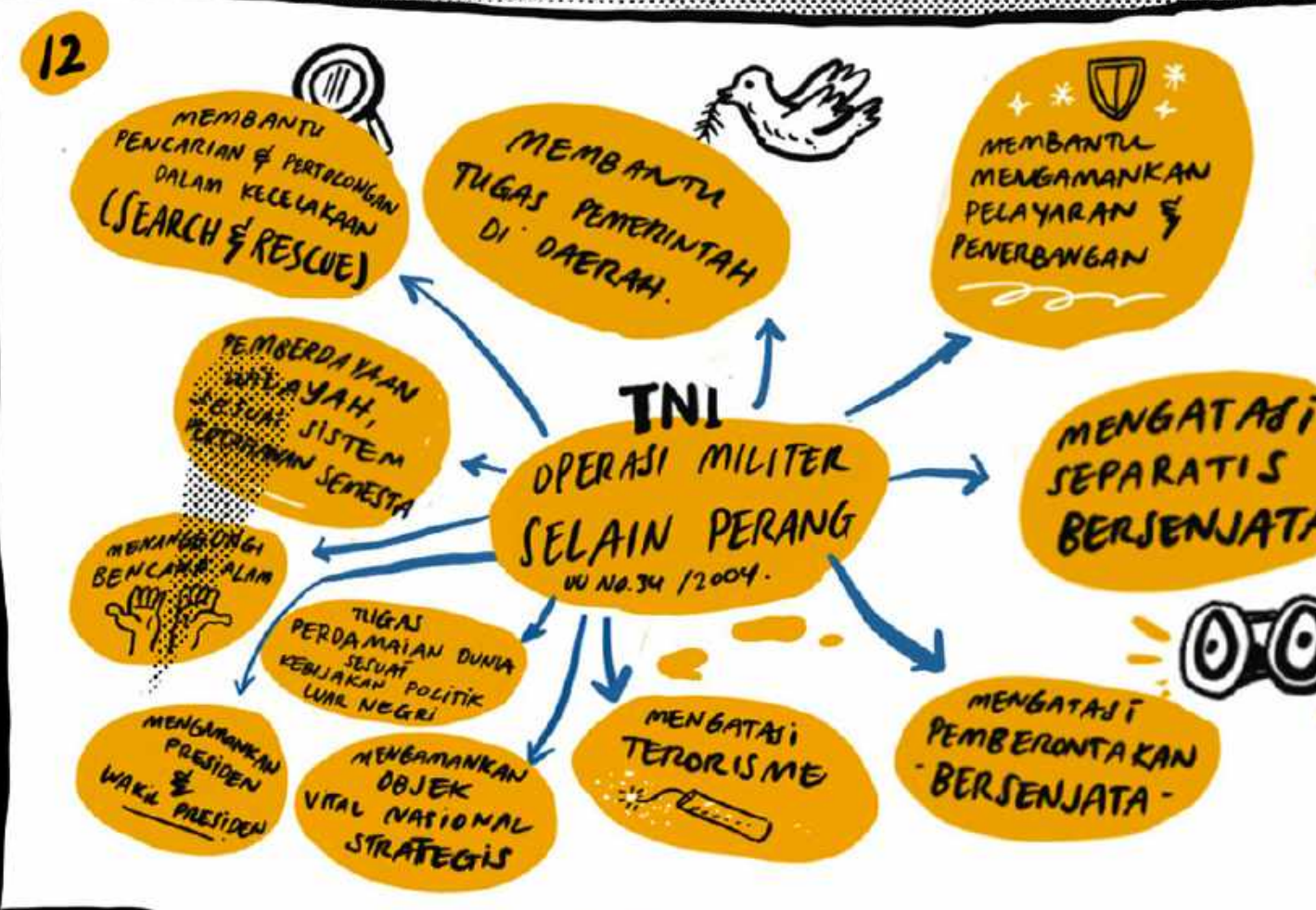
1. SISTEM HUKUM NEGARA TIDAK MAMPU MENJALANKAN FUNGSI NYA

2. KURANG BISA MENUNJUKKAN RASA KEADILAN BAGI KORBAN.

7. MENGAPA MEKANISME NASIONAL DIBUTUHKAN?

1. KEWAJIBAN MENEGAKKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL PADA NEGARA.

2. MENUNJUKKAN KE DAULATAN DAN MARTABAT BANGSA.



PENUNTUTAN & PENGADILAN PIDANA UNTUK KEJAHATAN PERANG



TRIHONI NALESTI DEWI  
UNIVERSITAS SOEGIJAPRANATA SEPAHAM

8. KEWAJIBAN NEGARA MENEGAKKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

11. OPERASI MILITER

PERANG (OMP)

- PENGERAHAN KEKUATAN BERSENJATA MELAWAN KEKUATAN MILITER NEGARA LAIN
- ADA PERNYATAAN PERANG
- HUKUM PERANG INTERNASIONAL

SELAIN PERANG (OMSP) (PERTAHANAN NEGARA) (KEPENTINGAN NASIONAL)

10. MEKANISME NASIONAL

- PENGADILAN KONEKSITAS ACEH
- HUKUM PIDANA SIPIL
- KUHP
- DRAFT REVISI KUHP

HUKUM PIDANA KHUSUS

- HUKUM MILITER
- PENGADILAN MILITER
- HUKUM DISIPLIN MILITER
- ANKUM
- HUKUM HAM (BELUM ADA KEJAHATAN PERANG)
- UU PENGADILAN HAM

9. MEKANISME INTERNASIONAL

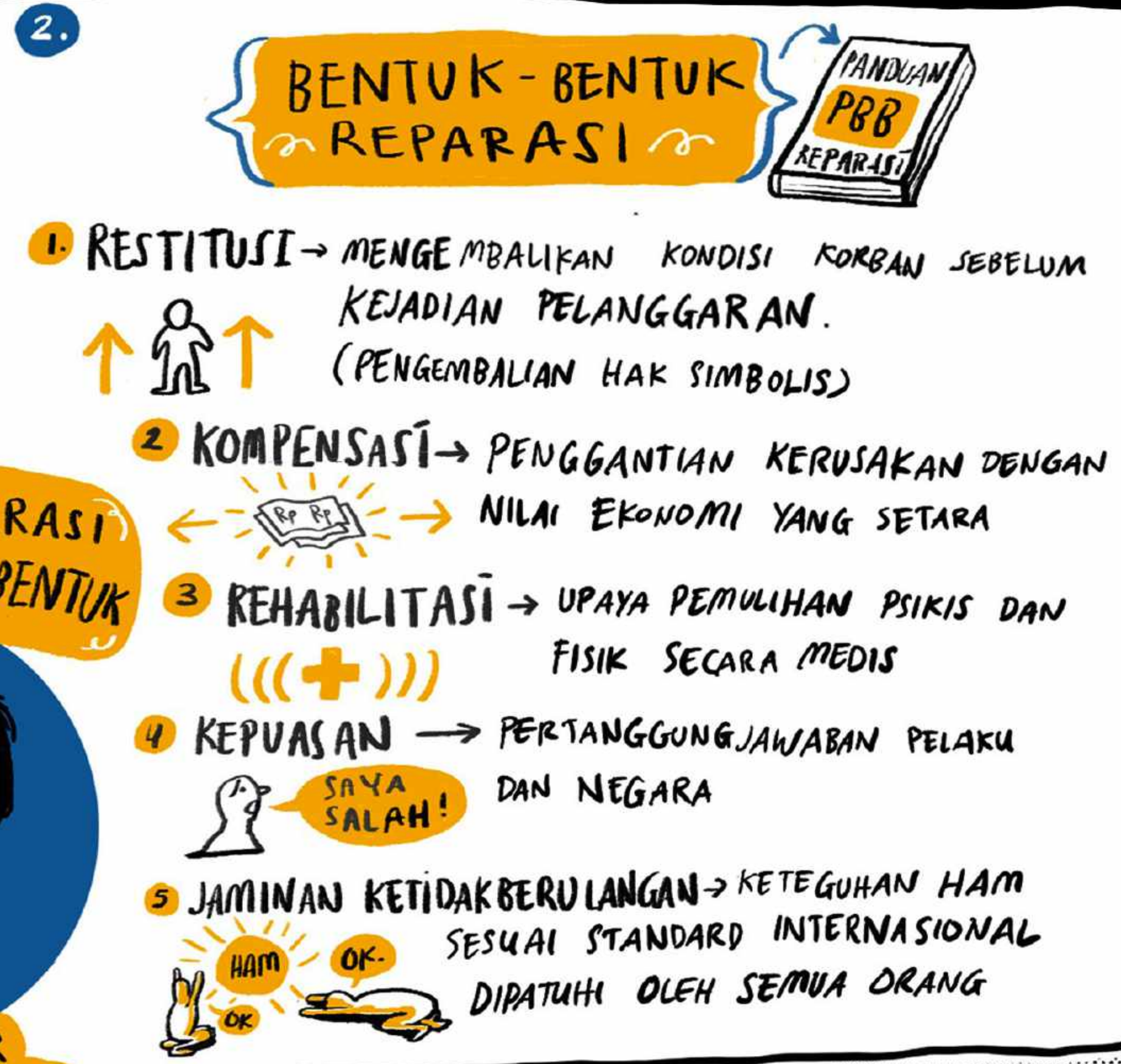
"PASAL 13 STATUTA ROMA 1998"

"PENGADILAN INTERNASIONAL KEJAHATAN PERANG DAPAT DILAKSANAKAN KALAU"

- DI AJUKAN NEGARA YANG MERATIFIKASI PADA PENUNTUT UMUM
- DI AJUKAN DK YANG BERTINDAK BAB VII PIAGAM PBB
- DIPRAKARSA SENDIRI OLEH PENUNTUT UMUM

- MEMBUAT PERATURAN PIDANA, MEMUAT SANKSI
- MENGHUKUM PELAKU KEJAHATAN
- MENCARI PELAKU TANPA TERKECUALI
- MENYERAHKAN NEGARA LAIN UNTUK MENGADILI
- KERJASAMA UNTUK MENGHUKUM.

# REPARASI



## HAK ATAS REPARASI PENGERTIAN & BENTUK



DODI YUNIAR AJAR-TJAN

- 4 PROGRAM REPARASI ADMINISTRATIF**
1. CAKUPAN PERSONALAN LUAS.
  2. MERESPON PELANGGARAN SKALA MASIF
  3. MENGATASI MASALAH KOMPLEKS: PENERIMA MANFAAT, KORBAN, TIPE PELANGGARAN
  4. FLEKSIBEL DARI SEGALA BENTUK REPARASI
  5. KORBAN DAPAT MENENTUKAN REPARASI YANG LAYAK DAN BERARTI
  6. SIAPA YANG HARUS DIPERHATIKAN?

4. REPARASI TANPA PENGAKUAN?

5. KEADILAN TRANSISI TANPA REPARASI?

2. REPARASI TANPA KEADILAN PIDANA? REPARASI TIDAK TERKAIT PUTUSAN PENGADILAN.

3. REPARASI TANPA REFORMASI = REPARASI TANPA JAMINAN KETIDAKBERULANGAN

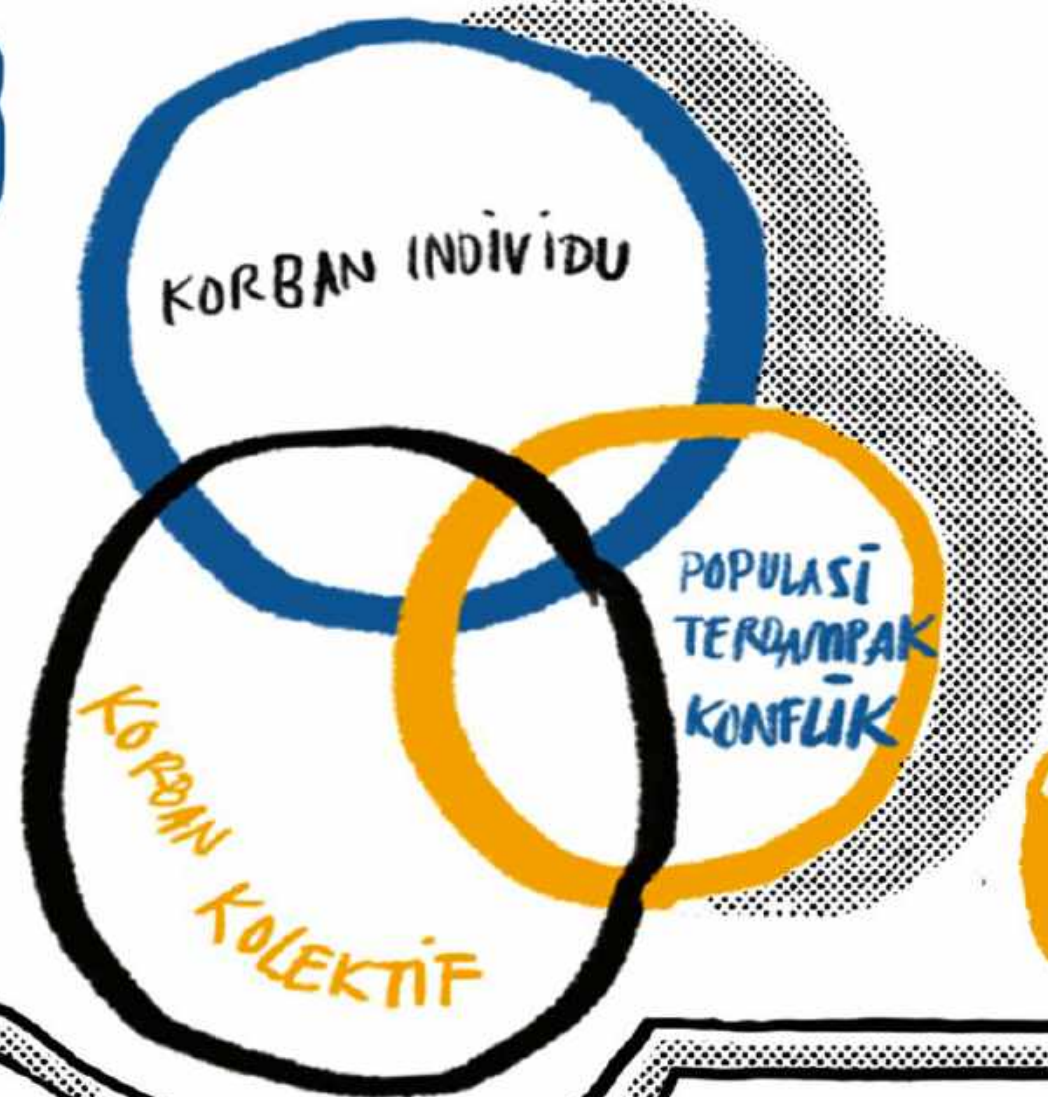
## 3 REPARASI & KEADILAN TRANSISI

1. REPARASI TANPA KEBENARAN? = uang tutup mulut



# REPARASI

## 5 KORBAN



## 6 KEBIJAKAN REPARASI APA, SIAPA, BAGAIMANA?

FAK ATAS REPARASI PENGERTIAN & BENTUK



DODI YUNIAR AJAR-TJAN

1. KATEGORI KORBAN DAN TIPE PELANGGARAN.
2. BENTUK REPARASI.
3. DESAIN PROGRAM EFEKTIF.
4. MEMASTIKAN PARTISIPASI KORBAN.

## 8 JENIS REPARASI

### INDIVIDUAL

#### SIMBOLIK

1. SURAT PERMINTAAN MAAF
2. PENGUBURAN KEMBALI KORBAN

#### MATERIAL

1. KOMPENSASI
2. BEASISWA
3. PENGEMBALIAN RUMAH YANG HANCUR

### KOLEKTIF

#### SIMBOLIK

1. PEMERINTAH MEMINTA MAAF
2. MONUMEN
3. HARI PERINGATAN



#### MATERIAL

1. PENGEMBANGAN KOMUNITAS
2. MEMBANGUN PUSAT TRAUMA
3. AKSES EKONOMI MIKRO

## 7 CARANYA?

1. DESAIN PROGRAM REPARASI?



2. SIAPA YANG MELAKSANAKAN?



3. DENGAN INFRASTRUKTUR APA?



4. BAGAIMANA PROGRAM BERKELANJUTAN?

5. APAKAH REPARASI = BANTUAN SOSIAL?

6. BAGAIMANA KORBAN MENDAPAT REPARASI?

# REPARASI

- 1. PENGALAMAN KORBAN DALAM KONFLIK**
- 2. KEKERASAN PSIKIS & FISIK**
- 3. BUDAK SEKSUAL & DIPAKSA ABORSI**
- 4. MENJADI MATA-MATA / CUAK**
- 5. DITAHAN, DIBUNUH**
- 6. HARTA BENDA DIRUSAK**
- 7. DIBUANG**
- 8. KERJA PAKSA**
- 9. KAWIN PAKSA BUDAK SEKSUAL**
- 10. DIPAKSA DAN DIKLAIM SEBAGAI PIHAK LAWAN**
- 11. DIPISAH DARI KELUARGA**

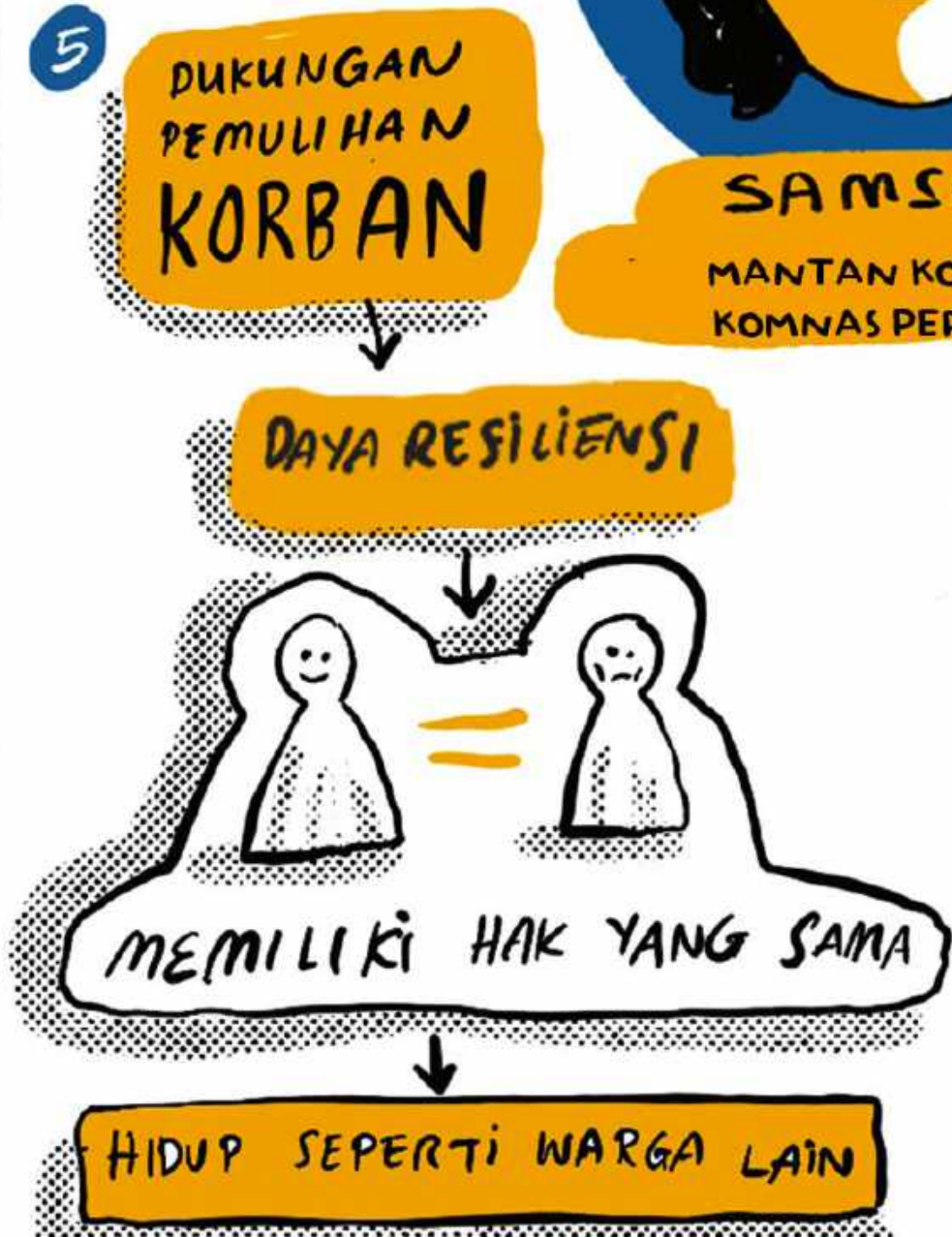
- 1. Menjadi Pelaku kekerasan**
- 2. KEKORUTAN KEPERCAYAAN DIRI**
- 3. TRAUMATIS, GANGGUAN JIWA**
- 4. TERGANGGUNYA ORGAN REPRODUKSI**
- 5. KDRT**
- 6. PUTUS CITA-CITA**
- 7. Hilang HARTA BENDA**
- 8. Kehilangan Orang Terdekat**
- 9. DIKUCILKAN**
- 10. Difabel**
- 11. MENDAPAT STIGMA**
- 12. SEBATANG KARA**

## PENYINTAS & REPARASI yang MEMBERDAYAKAN



**SAMSIDAR**  
MANTAN KOMISIONER KOMNAS PEREMPUAN

- 1. PENGUATAN PSIKO-SOSIAL**
- 2. KONSOLIDASI ORGANISASI KORBAN**
- 3. DOKUMENTASI PENGALAMAN KORBAN**
- 4. RUMAH BELAJAR**
- 5. PERINGATAN MEMORIALISASI**
- 6. INISIATIF MODEL PEMULIHAN**
- 7. LAYANAN KESEHATAN**



LAKI-LAKI, PEREMPUAN, ANAK-ANAK DAN DEWASA DAPAT MENJADI KORBAN PERAMPASAN HAM

- PEREMPUAN**
- KEKERASAN SPESIFIK
- DAMPAK DIDERITA TIDAK TUNGGAL
- PEMULIHAN TIDAK DISERAGAMKAN

NAMUN,



# REPARASI

## PEMBELAJARAN DARI ACEH



1. LAYANAN KESEHATAN BERBASIS WAKTU TIDAK TERINTEGRASI DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

2. DIYAT: TIDAK MENGAKUI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (SEPERTI KEKERASAN SEKSUAL, PENYIKSAAN SEKSUAL, HAMIL PAKSA, DLL.

BEASISWA: ORIENTASINYA PENDIDIKAN TINGGI DAN FORMAL.



3. BANTUAN TIDAK DIBERIKAN KEPADA MEREKA YANG MEMBUUTUHKAN. CONTOH: KELOMPOK RENTAN, PEREMPUAN, ANAK, LANJUT USIA.

TIDAK MENGAKUI POLA PELANGGARAN KEKERASAN YANG DIALAMI OLEH PEREMPUAN.



4. FOKUS PADA PEMBAYARAN TUNAI, BUKAN PADA PROGRAM PENUNJANG KESINAMBUNGAN KESEJAHTERAAN.

PENYINTAS & REPARASI yang MEMBERDAYAKAN



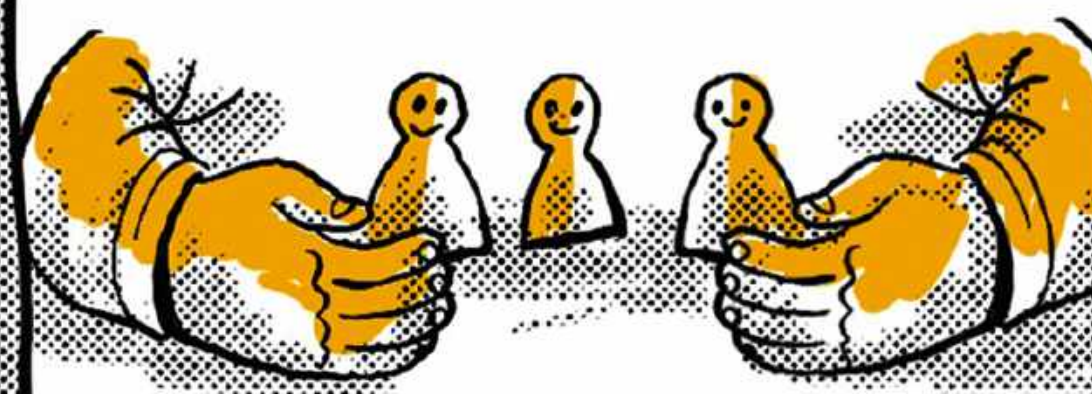
SAMSIDAR  
MANTAN KOMISIONER  
KOMNAS PEREMPUAN

## PEMBELAJARAN DARI TIMOR LESTE

1. BELUM ADA PROGRAM REPARASI UNTUK KORBAN KONFLIK 1975-1999. DIFOKUSKAN UNTUK VETERAN.



2. KOMISI KEBENARAN DAN PERSAHABATAN (CAVR) MEMBENTUK SKEMA REPARASI KECIL, MELAYANI 700 KORBAN RENTAN.



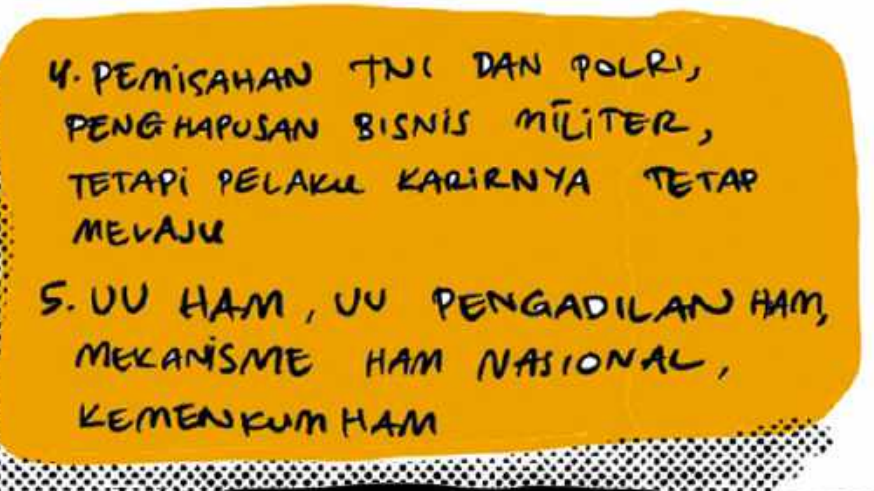
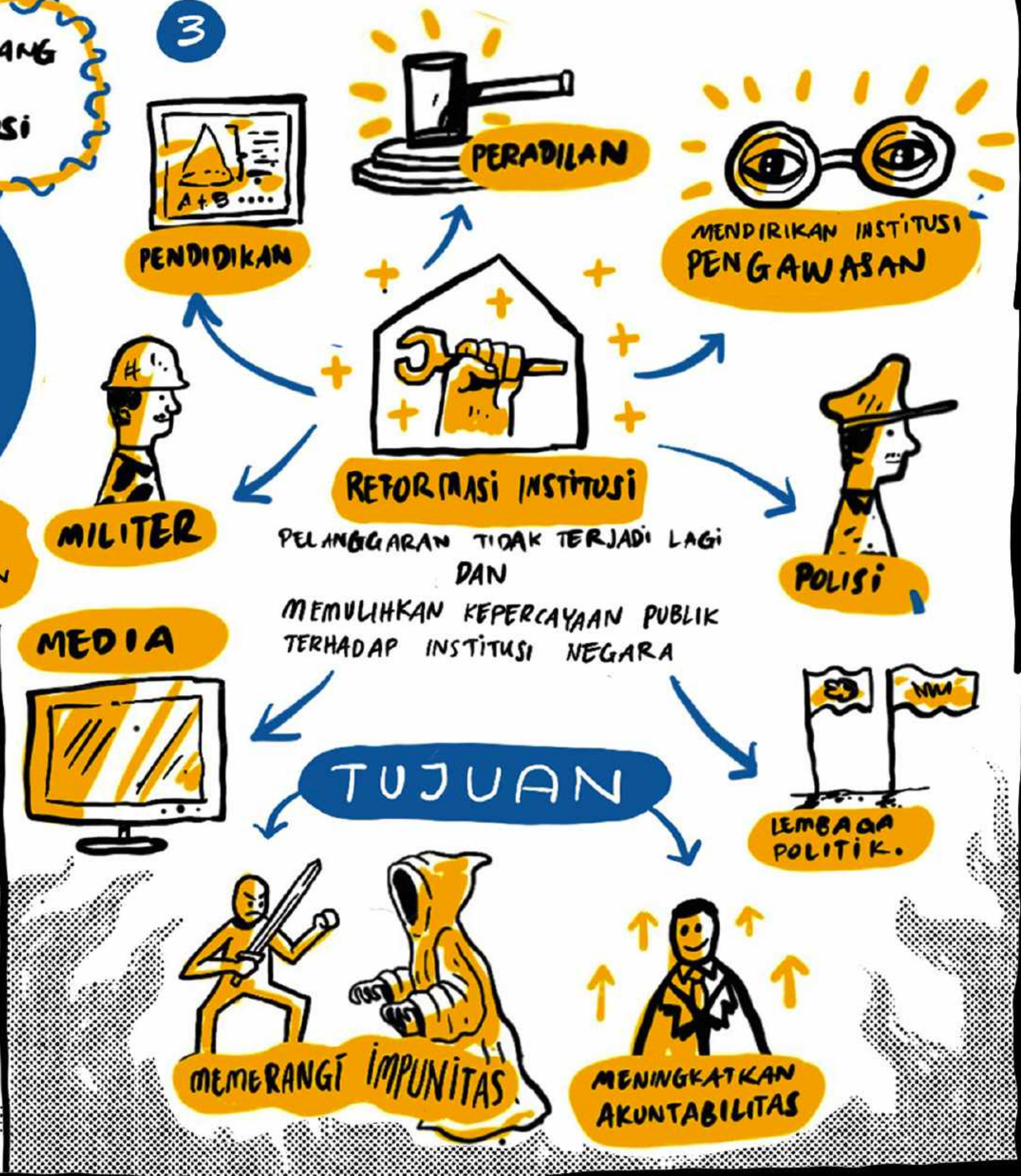
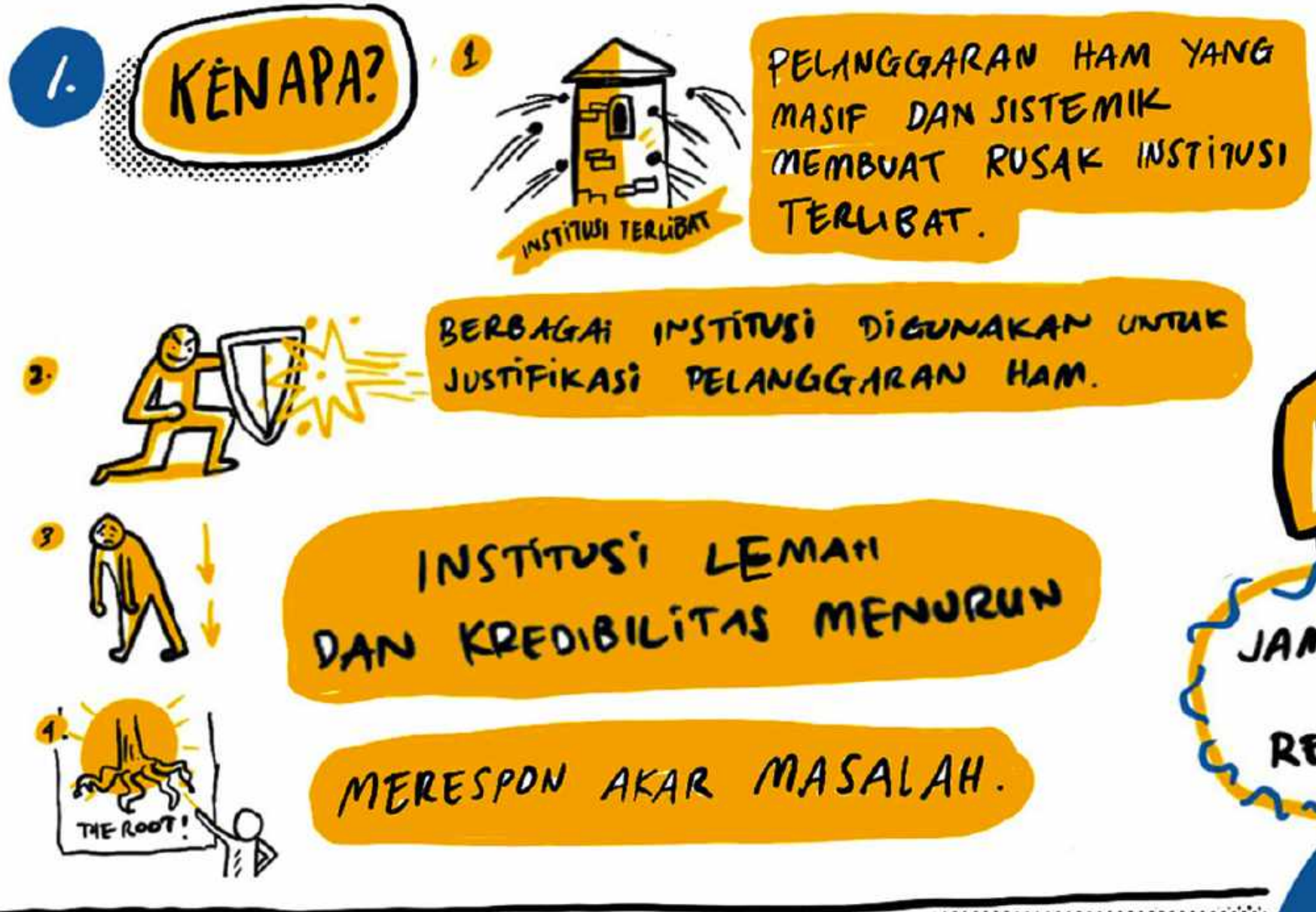
3. KONSOLIDASI-SOLIDARITAS ANTAR KOMUNITAS PENYINTAS DAN KOLABORASI DENGAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL ADALAH JALAN TERBAIK UNTUK MENGHADIRKAN-MENGADVOKASI HAK ATAS REPARASI BAGI KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT



## 4. REPARASI ALTERNATIF

MEMBANTU KORBAN YANG RENTAN SUBSIDI JANDA, MEMBANGUN RUMAH KECIL, → MEMPERBAIKI KONDISI KORBAN

# JAMINAN TIDAK BERULANG



# JAMINAN TIDAK BERULANG

1.

PERJANJIAN DAMAI  
MOU HELSINKI  
15 AGUSTUS 2005

PELUCUTAN SENJATA  
dan  
DEMobilisasi



GAM  
MENYERAHKAN  
840 SENJATA



2. PEMBERHENTIAN PELAKU KEJAHATAN  
DARI JABATAN.  
BERDASAR PROSES PENGUNGKAPAN KEBENARAN,  
ATAU PROSES PENGADILAN ATAU ADMINISTRATIF.

3. KEBIJAKAN VETTING BELUM ADA KEMAUAN  
DITERAPKAN DI INDONESIA.  
CONTOH: PELAKU PELANGGARAN HAM DI TIMOR LESTE : MASIH  
MENDAPATKAN JABATAN TINGGI.

4. TANPA VETTING, KREDIBILITAS LEMBAGA KEAMANAN  
PERADILAN AKAN RENDAH DI MATA PUBLIK.



LEMBAGA  
KEAMANAN

2.

KEBENARAN

DAN

KEADILAN  
TERTUNDA

ACEH



FAISAL HADI  
KONTRAS ACEH - TJAN

1. UU 27 / 2004 DIBATALKAN → KOMISI KEBENARAN  
NASIONAL JUGA BATAL.

2. KKR ACEH DIBENTUK OKTOBER 2016  
BERDASAR QANUN NO.17/2013 SETELAH  
DIDESAK ORGANISASI KORBAN DAN MASYARAKAT  
SIPIL.

3. DUKUNGAN POLITIK PEMERINTAH ACEH DAN  
INDONESIA MASIH RENDAH

4. PERMASALAHAN JETELAH DISAHKAN UPA

5. PENGADILAN HAM DIBENTUK BERDASAR UU  
26/2000, NAMUN PENGADILAN SEHARUSNYA  
BERADA DI MEDAN DENGAN JURISDIKSI ACEH  
TIDAK AKTIF

6. KOMNAS HAM → PENYELIDIKAN PRO-JUSTICIA →  
KASUS ACEH, KEJAKSAAN AGUNG BELUM  
PERNAH MENYIDIK.

7. BELUM ADA PROSES PENGADILAN UNTUK KASUS  
HAM SEJAK MOU HELSINKI DITANDATANGANI.

3

## TRANSFORMASI SETENGAH HATI

1. PERANAN TNI DIPERLUAS DALAM UPA  
→ KEAMANAN INTERNAL

2. TANPA KEMAUAN KUAT UNTUK AKUNTABEL  
DAN TIDAK MELAKUKAN KEKERASAN LAGI  
"BUSINESS AS USUAL"

3. JUMLAH PASUKAN TNI BERTAMBAH  
SETRING PEMEKARAN ACEH.

4. HALANGAN DALAM PELAKSANAAN UPA

5. PERLU DORONGAN DAN UPAYA BERSAMA  
UNTUK JAMINAN YANG DIINGINKAN.

UPAYA BERSAMA



# JAMINAN TIDAK BERULANG

## 1. BASIS

KEWAJIBAN NEGARA ANGGOTA PBB UNTUK MEMPROMOSIKAN PENGHORMATAN UNIVERSAL UNTUK MEMATUHI HAM DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA.

## 2.

**PELANGGARAN HAM**

- NORMA HAM → NEGARA BERKEWAJIBAN UNTUK MENGHORMATI HAM
- PELANGGARAN HAM (INTERNASIONAL) TINDAKAN PELANGGARAN HAM ATAU PENGABAIAN KEWAJIBAN NEGARA; PELANGGARAN ATAS KEWAJIBAN INTERNASIONAL NEGARA

## 3.

### DOKTRIN IMPUNTABILITAS

1. TINDAKAN MAPAK KE DALAM OTORITAS KONSTITUEN
2. NEGARA DIWAKILI OLEH PEJABAT, PERWAKILAN YANG SAH.

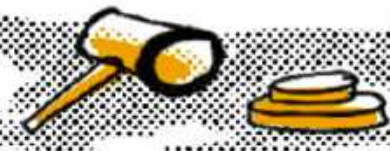
## 4.

### REPARASI

1. PEMULIHAN KEADAAN SEMULA
2. PEMBAYARAN DALAM JUMLAH YANG SAMA DENGAN RESTITUSI IN KIND.

## 9.

### KEJAKSAAN AGUNG



**PERSOALAN**

1. PENDEKATAN MILITERISTIK (TOP DOWN)
2. MENGACU PADA SIMBOL JAKSA AGUNG.

## 10.

### PENGADILAN HAM



**PERSOALAN**

1. MEMBEBASKAN SEMUA PELAKU PELANGGARAN HAM BERAT
2. HUKUM ACARA: MASIH MENGACU PADA HUKUM PIDANA
3. UNFAIR TRIAL.

## 11.

### KEPOLISIAN



**PERSOALAN**

1. PERSOALAN KULTURAL: KEKERASAN
2. MENOLAK TUNDUK PADA HUKUM HAM INTERNASIONAL
3. PERKAP HAM

## 12.

### MILITER



**PERSOALAN**

1. PERADILAN MILITER: MENGADILI TINDAK SIPIL YANG DILAKUKAN MILITER
2. MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SIPIL HARUS DIADILI DI PENGADILAN SIPIL.

## PELANGGARAN HAM DAN REFORMASI KELEMBAGAAN DI INDONESIA



**EKO RIYADI**  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA SEPAHAM

## 5.

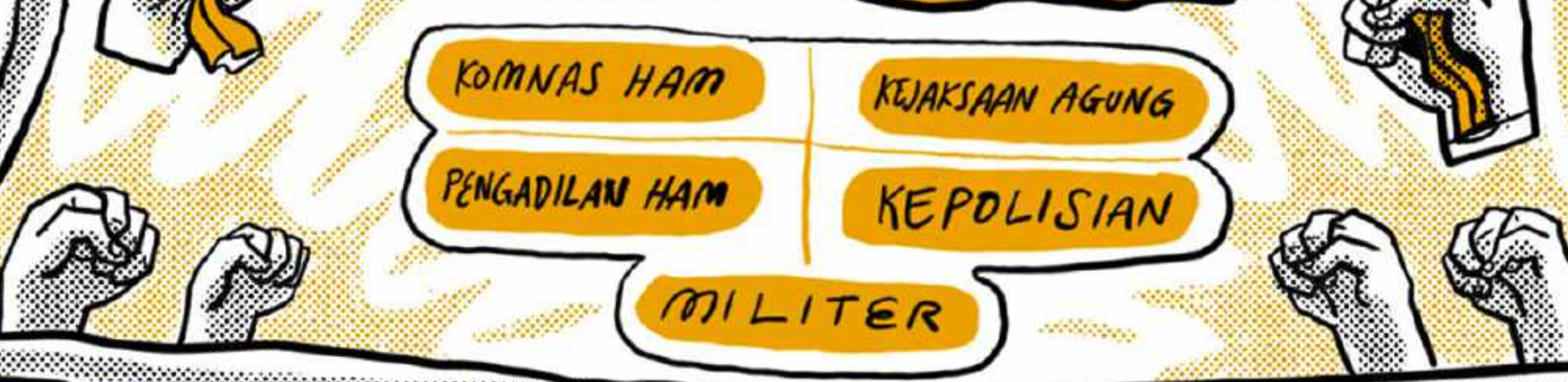
### REMEDIES

→ REPARASI: KOMPENSASI, RESTITUSI DAN PERMINTAAN MAAF

- BERBENTUK KEPUASAN ★★★★★
- JAMINAN TIDAK ADA PENGULANGAN (X)

## 6.

### REFORMASI INSTITUSI DI INDONESIA



## 8.

### PERIHAL KOMNAS HAM

1. LEGAL STANDING UNTUK MENGGUGAT LEMBAGA NEGARA LAIN.
2. TANGGUNG JAWAB KEMANA?
3. REFORMASI REKRUTMEN ANGGOTA KOMNAS HAM
4. KEWENANGAN SUB POENA TERMAUK KEKUATAN REKOMENDASI DAN KEBIJAKAN KOMNAS HAM
5. HAK IMUNITAS FUNGSIONAL BAGI ANGGOTA KOMNAS HAM
6. KEBUAKAN KEPEGAWAIAN KOMNAS HAM
7. KEBERADAAN KANTOR DAERAH
8. GENOSIDA DAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN KOMNAS VS. KEJAKSAAN AGUNG.

## 7.

### KOMNAS HAM

**PERSOALAN:**

1. KETIDAKJELASAN KONSEP PELANGGARAN HAM
2. FUNGSI YANG TUMPANG TINDIH

### HAL-HAL YANG PENTING !

1. MEMURNIKAN KOMNAS HAM VS MEMPERKUAT PENEMANGAN
2. MEMURNIKAN UU NO.26 TAHUN 2000 VS MEMPERKUATNYA
3. PENGADILAN HAM
4. PELEMBAGAAN PEMBERIAN KOMPENSASI PADA KORBAN.

# KEADILAN TRANSISI DI ASIA

1. PENCEMARAN NAMA BAIK DAN HUKUM ELASTIS → PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG DILEGALKAN
2. KRIMINALISASI DAPAT MENGANCAM KEBEBASAN PERJS
3. HOAX MASIF DAPAT MENJADI DELEGITIMASI SISTEMATIS
4. BERKUASANYA OLIGARKI → PARTISIPASI POLITIK DIKERDILKAN
5. IMPUNITAS → SINYAL KEMEROSOTAN DEMOKRASI



**6.128 ORANG**  
KORBAN PELANGGARAN  
KEBEBASAN BERPENDAPAT.

"TIDAK JADI AGENDA SERIUS DALAM KONTEKS HUKUM INDONESIA!"

**KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN KEBEBASAN AKADEMIK**

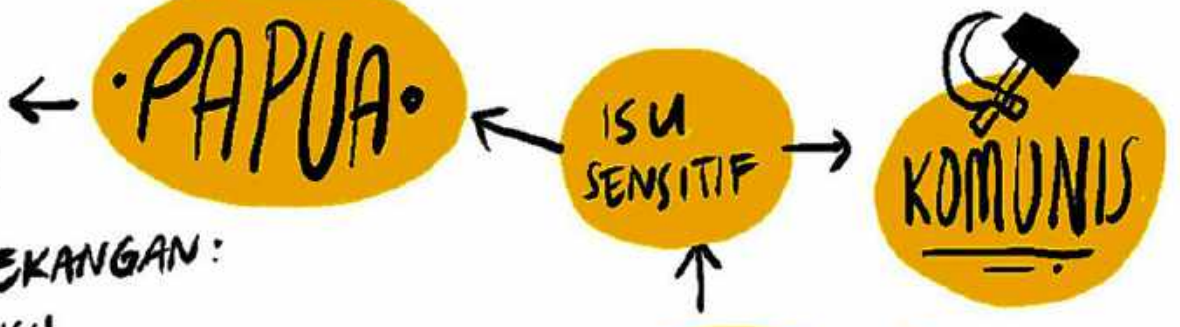


**7 RETREATING DEMOCRACY SCORE**  
SHUTDOWN INTERNET DI PAPUA

- 43.000 MEDIA ONLINE YANG TIDAK JELAS (2019)
- 260 KASUS PIDANA MELALUI UU ITE (SAFENET, 2018)
- INDEX EKONOMI DEMOKRASI 2018, 6,36 DARI 10
- KEBEBASAN BEREKSPRESI 62 DARI 100 (FREEDOM HOUSE, 2019)
- 2019: 3.325 KASUS PENYEBARAN KEBENCIAN, TERMASUK 444 KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK.



**VERONIKA KOMAN**  
- DISTIGMA MENGKHIANATI NEGARA.  
- DIANCAM PIDANA UU ITE



- CONTOH PENGKEMANGAN:
1. SWEEPING BUKU
  2. PEMBUBARAN DISKUSI BUKU / FILM
  3. REKTOR DIMINTA MENDISIPLINKAN DOJEN / MAHASISWA

**5 SERANGAN BALIK UNTUK PENYAJI KEBENARAN**



ADA UPAYA DARI PIHAK EKSEKUTIF MEMANTAU AKTIVIS - AKTIVIS DENGAN:

**SK MENKOPOLHUKAM**  
NO.38 TAHUN 2019



INTERVENSI KEKUASAAN EKSEKUTIF TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM YANG MENJADI RANAH YUDISIAL

**4 THE RISE - of - AUTHORITARIANISM**

1. MENYEMBAH TUNTUTAN MEREKA ATAS NAMA "STABILITAS NEGARA"
2. KOMERSIALISASI DAN KETERLIBATAN YANG LEBIH KUAT DENGAN SUMBER MODAL.
  - UNTUK KONSESI POLITIK DAN MODAL
  - MENGEMBANGKAN KOMUNITAS AKADEMIS YANG LEBIH BAIK UNTUK MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN ILMU PENGETAHUAN.
  - SHIFT: KORPORATISME MILITER NEGARA MEMBENTUK UNIVERSITAS, KONTROL PENETRASI PASAR DISPONSORI NEGARA. LEBIH OTORITER.



- 3 TUGAS TIM PENYIDIK KHUSUS PEMERINTAH.
  - BERTUGAS SEOLAH SEBAGAI PENYELIDIK DAN PENYIDIK KHUSUS PEMERINTAH.
  - BERPELUANG MENIMBULKAN PEMBUNGKAMAN KEMERDEKAAN BEREKSPRESI, BERPIKIR, DAN BERPENDAPAT SERTA PRINSIP PERSAMAAN DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL.

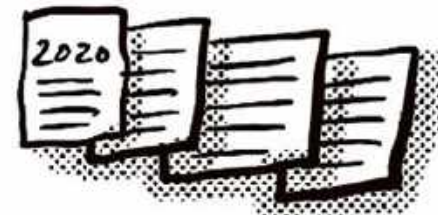
14



1. KONSTAN TERJADI SEJAK 2015.
2. REORGANISASI KUASA OLIGARKI, DAN MASUK, MENDOMINASI DALAM FORMAL POLITIK DEMOKRASI. INKUBASI POLITIK WARISAN ORBA
3. HUKUM MENGUATKAN KUASA OLIGARKI

13

## KASUS TERKINI, 2020



1. KASUS DISKUSI PEMAKZULAN DI UGM (29 MEI 2020). ADA INTIMIDASI DAN ANCAMAN PEMBUNYAHAN.



3 AKTIVIS DI MALANG DITANGKAP SEWENANG-WENANG DENGAN TUDUHAN VANDALISME DENGAN MAKPOD MENGHASUT PUBLIK.



3. **DIHACK!**  
RAVID PATRA WHATSAPP DIBAJAK. HINGGA KINI PEMBAJAK BELUM DIKETAHUI.

## KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN KEBEBASAN AKADEMIK

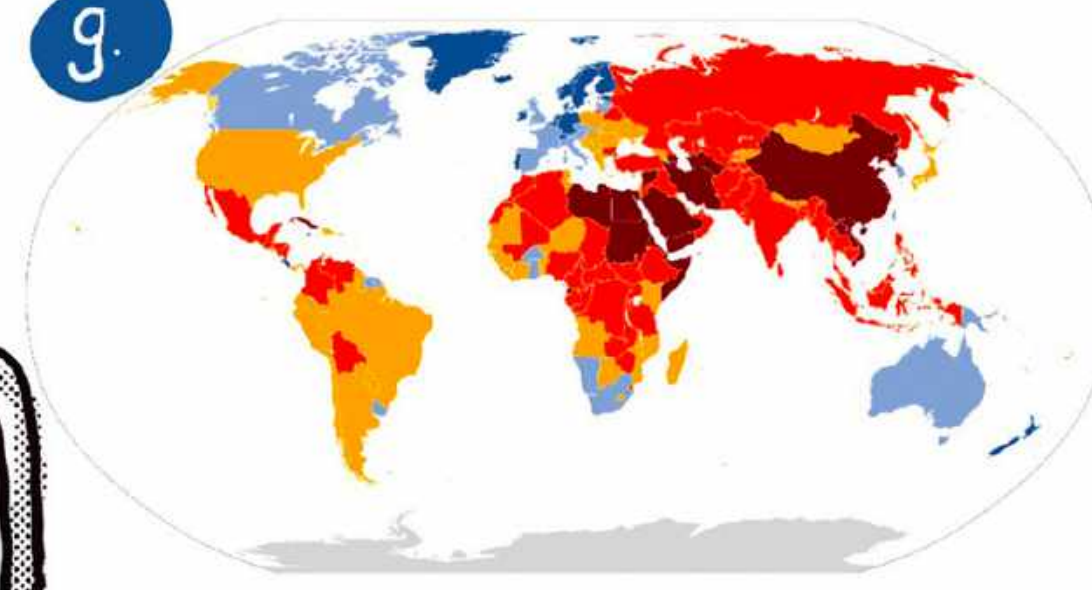


DR. HERLAMBAANG WIRATRAMAN (HRLS UNAIR / SEAHRN / SEPAHAM)

12

BAGAIMANA OTORITARIANISME BERTAHAN DI INDONESIA? DAN APA DAMPAKNYA BAGI KEBEBASAN EKSPRESI, HAM, DAN DEMOKRASI?

9



PETA KEBEBASAN PERS. INDONESIA MENDAPAT PREDIKAT MERAH.

ANCAMAN KEBEBASAN MEDIA BERSAMAAN DENGAN KEBANGKITAN PEMERINTAH POPULIS DAN OTORITER: KEBEBASAN MEDIA SEBAGAI LAWAN DARIPADA ASPEK FUNDAMENTAL DARI MASYARAKAT BEBAS.

10



PANDEMI MEMPERCEPAT PROSES KOLAPSNYA MEDIA.

MEDIA YANG KREDIBEL TURUT MERASAKAN BAYANG-BAYANG KOLAPS!

11

## JOKOWI DI MATA LITERATUR

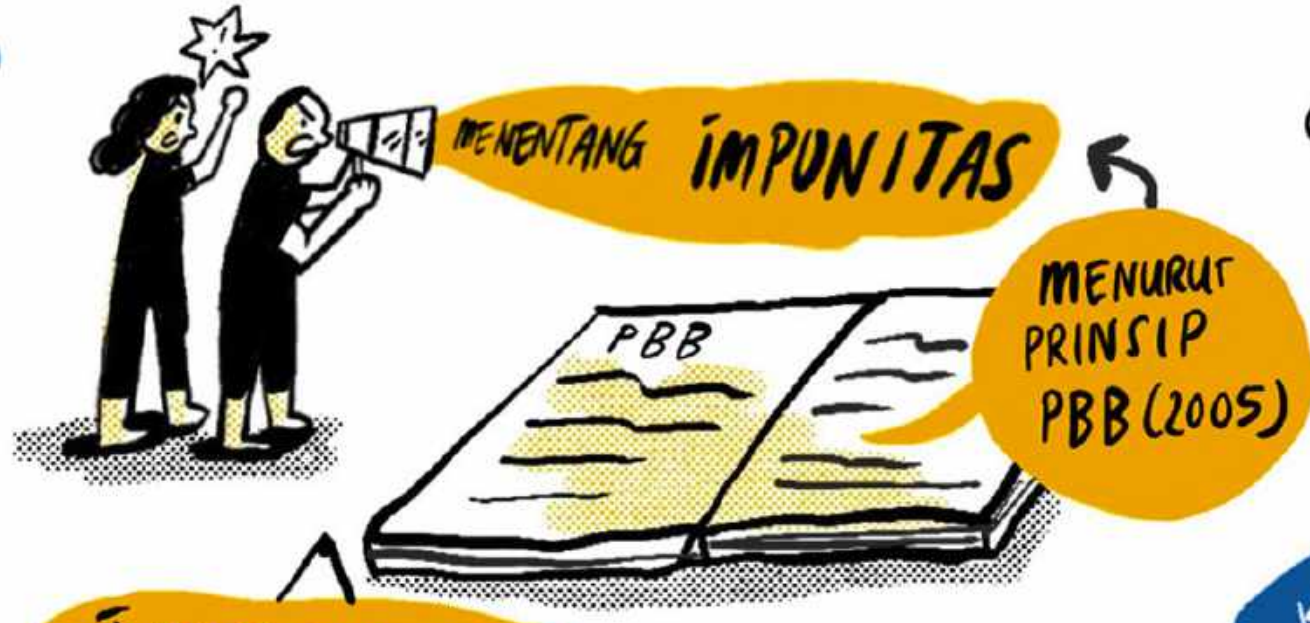


1. DEFECTIVE DEMOCRACY (MIETZNER, 2016)
2. DEMOCRATIC SETBACK (HADIZ, 2017)
3. DEMOCRATIC REGRESSION (ASPINAL and WARBURTON, 2018)
4. AUTHORITARIAN TURN (POWER, 2018)
5. NEO-OTORITARIANISME (WIRATRAMAN, 2018)
6. DEMOCRATIC BACKSLIDING - DEMOCRATIC RESSESSION (ASPINAL and MIETZNER, 2019)
7. ILIBERAL DEMOCRACY (WARBURTON and ASPINAL, 2019)



# KEADILAN TRANSISI DI ASIA

1.



MENENTANG IMPUNITAS

MENURUT PRINSIP PBB (2005)



## KEADILAN TRANSISI DI ASIA

2.

## KEADILAN TRANSISI DI ASIA

1. SEJAK 1980 NEGARA YANG MENGADOPSI KEADILAN TRANSISI MENINGKAT.
2. DILAKUKAN SECARA STIMULTAN ATAU BERURUTAN.
3. DI ASIA MEKANISME YANG DIPAKAI PENGADILAN, KOMISI KEBENARAN / KOMISI INDEPENDEN, SERTA AMNESTI

### IMPUNITAS

"KEGAGALAN NEGARA SECARA DE JURE DAN DE FACTO MEMENUHI KEWAJIBAN MEREKA DALAM MENYELIDIKI DAN MEMERIKSA PELANGGARAN / KEJAHATAN!"



INDRIA FERNANDA (ASIA JUSTICE AND RIGHTS)

4.



POST KOMISI KEBENARAN

**THAILAND**  
 - KOMITE UNTUK KOORDINASI DAN TINDAK LANJUT TINDAKAN YANG DIAMBIL UNTUK MELAKSANAKAN REKOMENDASI KOMISI KEBENARAN UNTUK REKONSILIASI THAILAND (ITRICT)

**TIMOR LESTE**  
 CENTRO NACIONAL CHEGA! (CNC)  
 - IMPLEMENTASI REKOMENDASI KKR (CAVR) DAN KOMISI KEBENARAN DAN PERSAHABATAN INDONESIA - TIMOR LESTE

5.

### PENGADILAN NASIONAL

- INDONESIA : TIMOR TIMUR (2002) TANJUNG PRIOK (2003) ABEPURA, PAPUA (2004)
- BANGLADESH : GENOSIDA 1971 (2010)

### PIDANA INTERNASIONAL

- MYANMAR KABUS ROHINGYA (MULAI TAHUN 2018)
- FILIPINA PERANG MELAWAN NARKOBA (MULAI TAHUN 2018)

### HYBRID

- KAMBOJA ECC MENGADILI PEMIMPIN KHMER MERAH 7 APRIL '75 DAN DIDIRIKAN TAHUN 2003
- TIMOR LESTE PENGADILAN DISTRIK DILI "KEJAHATAN BERAT" (2000-2006)

3.



# KEADILAN TRANSISI DI ASIA


1.  KEADILAN TRANSISI DI ASIA TIDAK MENJADI ACUAN DI DUNIA INTERNASIONAL

PEMBELAJARAN KEADILAN TRANSISI DI ASIA

TRANSFORMASI KEADILAN TRANSISI

KEADILAN TRANSISI DI ASIA


INDRIA FERNIDA (ASIA JUSTICE AND RIGHTS)

2.  REKONSILIASI "ASIAN VALUES" DAN REKONSILIASI ADALAH KATA YANG SERING DIGUNAKAN UNTUK BERSEMBUNYI PELAKU

3.  HA? MODEL AFSEL UNTUK AMNESTI PADA WAKTU PROSES PENGADILAN BERLANGSUNG BERSAMAAN DENGAN KKR.

4.  STRATEGI MENGATASI PELANGGARAN MASIF TIDAK PERNAH BUNTA.

5. JANGAN MEMBENTUK KOMISI KEBENARAN TANPA KOMISIONER INDEPENDEN DAN INTEGRITAS TINGGI

6.  KOMISI KEBENARAN KEMUNGKINAN BERHASIL JIKA DIDUKUNG MASYARAKAT SIPIL.

7.  KESEMPATAN UNTUK KORBAN BERSUARA SELWAS MUNGKIN UNTUK TRANSFORMASI -

8.  DISKRIMINASI → AKAR MASALAH. AGAR TAK BERULANG HARUS ADA TRANSFORMASI SOSIAL.

9.  FAKTOR PENJARAHAN SDA → PELANGGARAN HAM MASIF.

10. REPARASI, KOMPENSASI "MEMBELI PERDAMAIAN!"

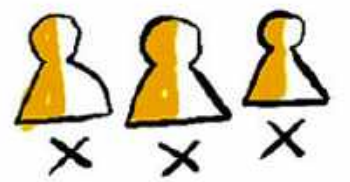
11. HAK KORBAN KALAH DARI KOMBATAN/VETERAN

12.  KETERLIBATAN PEREMPUAN HARUS DIPERJUANGKAN DALAM SETIAP FASE MEKANISME KEADILAN TRANSISI

13.  DAMPAK NEGATIF MEDIA SOSIAL.

14.  ANAK MUDA MASUK ORGANISASI YANG MENYERUKAN KEKERASAN.

15.  POLA KEKERASAN MASIF, SEPERTI PENYIKSAAN, "MENULAR" PADA MASA TRANSISI

16.  SEMUA PIHAK SAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB: TIDAK SEPENUHNYA BENAR.

17.  PARA PEJUANG BISA MENJADI BAGIAN DARI SISTEM KUASA YANG TADINYA DILAWAN.

18. LEMBAGA BANTUAN HUKUM: REFORMASI PASKA KONFLIK TAPI TIDAK DIINTEGRASIKAN DALAM KEADILAN TRANSISI

19.  PENGADILAN NASIONAL PULIT MENCAPAI STANDARD INTERNASIONAL, KECUALI ADA ASISTENSI SUBSTANTIF.

20. PERAN CSO MENDORONG TERBANGUNNYA MASYARAKAT YANG AKUNTABEL. ↳ JANGKA PANJANG

SUMBER: DUA PULUH PEMBELAJARAN DARI DUA PULUH TAHUN KEADILAN TRANSISI DI ASIA, AJAR, 2019.

6

## TANTANGAN

LINGKUNGAN AKADEMIS BELUM TERLIBAT PENUH UNTUK DISTRIBUSI PENGETAHUAN KEADILAN TRANSISI



5

## PROGRES

1. POLITISI PAHAM HAM dan KEADILAN TRANSISI → TANGGUNG JAWAB NEGARA
2. KEADILAN TRANSISI DILAKUKAN DAN ADA LEMBAGA MONITOR.
3. LSM PIONER PERGERAKAN



4

## KENDALA

12 TAHUN REKOMENDASI CAVR dan CTF

1. TIDAK ADA INSTITUSI MEMBANTU DESAIN REPARASI KE KEBIJAKAN PUBLIK
2. CNC → MEMONITOR REKOMENDASI DALAM KEBUAKAN
3. VAKUM 10 TAHUN, ADA GAP PADA PEJABAT.
4. TRANSISI POLITIK SELAMA 3 TAHUN BELAKANG
5. MEMBENTUK KESEIMBANGAN NARASI TENTANG SEJARAH KEMANUSIAAN, SUPAYA TIDAK DIMONOPOLI

## GOAL

7

DIADAPTASINYA TAWARAN CNC di KEBIJAKAN PEMERINTAH.

## KEADILAN TRANSISI DI TIMOR LESTE



HUGO FERNANDEZ (CENTRO NATIONAL CHEGA!)

## PILAR KE-4 KETIDAK BERULANGAN



3

REFORMASI MILITER & POLIS "PELATIHAN HAM"



## RESPON PEMERINTAH



1. KOMISI KEBENARAN, PENERIMAAN DAN REKONSILIASI (CAVR, 2002-2005) MEMENUHI HAK MENGETAHUI KEBENARAN TERHADAP KEJAHATAN KEMANUSIAAN YANG DILAKUKAN REZIM MILITER INDONESIA. LAPORAN KELUAR TAHUN 2005.
  - KOMISI KEBENARAN DAN PERSAHABATAN INDONESIA DAN TIMOR LESTE (CTF, 2005-2008) UNTUK KABUS TAHUN '99
  - PENGADILAN UNIT KEJAHATAN SERIUS HAM UNTUK KASUS TAHUN 1999, TIMOR LESTE
  - PENGADILAN HAM ADHOC UNTUK PELAKU DI INDONESIA → SEMUA PELAKU BEBAS.

2

## HAK REPARASI 2005-SEKARANG

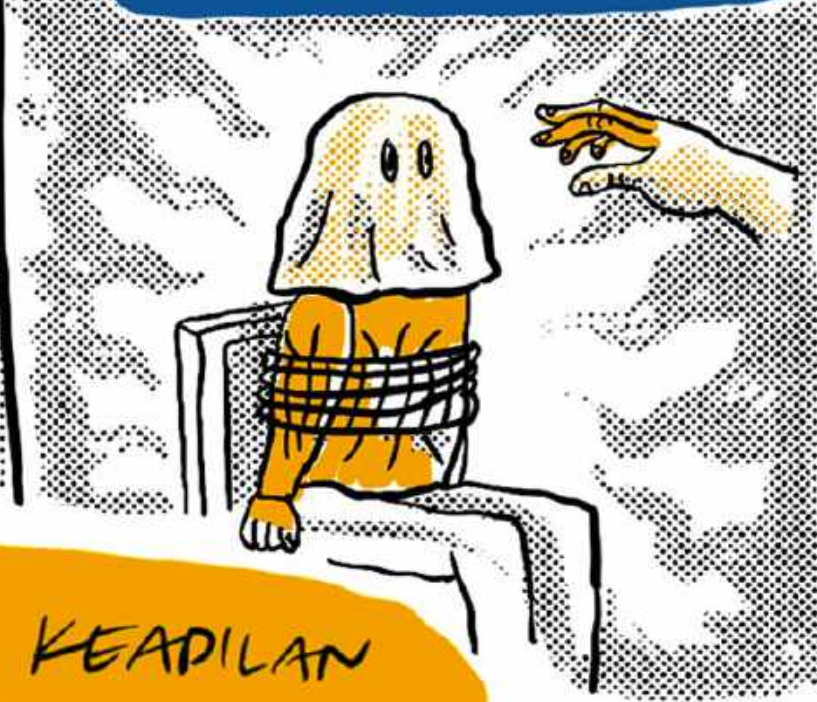


# TANTANGAN KEADILAN TRANSISI

## 1. POSISI NEGARA DALAM KEJAHATAN HAM

1. KEDAULATAN NEGARA MENGHENTIKAN BENCANA KEMANUSIAAN. (PIAGAM HAM PBB)
2. PERUBAHAN PARADIGMA HUKUM INTERNASIONAL MENUJU PERLINDUNGAN INDIVIDU (DUHAM)
3. OTORITARIANISME DAN DINAMIKA LOKAL (AGAMA, BUDAYA, DAN IDEOLOGI).

## 2. PERSOALAN PENGUNGKAPAN KEJAHATAN



## 1. PENGULANGAN SEJARAH '65 dan '98



## 2. PENGHILANGAN SEJARAH



## 3. INTOLERANSI DAN RADIKALISME



## 1. KONSENSUS

## 6. HARMONISASI KEADILAN

- KONSENSUS DALAM BERBAGAI BENTUKNYA "GAGAL" MENJAMIN HAK INDIVIDU YANG RENTAN " SECARA POLITIK, HUKUM, PENDIDIKAN, DAN BUDAYA "
- PLURALISME HUKUM - AGAMA SEBAGAI JEJARING SOSIAL = FILTER / PENENTU IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA
- NEGARA = " THE DEVIL LAW " (JOSEPH RAZ)



## DISKURSI KEADILAN DALAM TRADISI HUKUM INDONESIA & TANTANGAN TJ

## 3. NEGARA HUKUM SEPERTI APA?



AL KHANIF, Ph.D  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
SEPAHAM

- Keadilan dan integritas.
- Norma HAM konstitusi pasca amandemen.

## 5. INDEKS DEMOKRASI INDONESIA



NILAI 4

- ADA PROGRESS DARI ZAMAN ORBA
- KEBEBASAN BEREKSPRESI PUBLIK TURUN

### INDIKATOR: SUPREMASI HUKUM

- HUKUM YANG INDEPENDEN
- BERLAKU DALAM MASALAH PERDATA DAN PIDANA
- PERLINDUNGAN DARI TINDAKAN ILEGAL ATAS KEKUATAN FISIK DAN KEBEBASAN DARI PERANG DAN PEMBERONTAKAN.
- JAMINAN HUKUM, KEBIJAKAN DAN PRAKTEK DARI PENANGANAN SETARA DALAM POPULASI.

## 4. HAM DALAM SISTEM KESEIMBANGAN HUKUM INDONESIA?

### VIKTIMISASI KORBAN



### KESEIMBANGAN SOSIAL?

# TANTANGAN KEADILAN TRANSISI

## 6 KESIMPULAN.

- SUDAH BERJALAN DENGAN VARIASI
- KEADILAN TRANSISI DIKUTI DENGAN REFORMASI KELEMBAGAAN
- MENCAIBUT UU YANG REPRESIF



## 7 TANTANGAN

- PEMERINTAH TERSANDRA KEPENTINGAN POLITIK.
- DITENTUKAN RELASI POLITIK DI KEKUASAAN

## TANTANGAN KEADILAN TRANSISI KE DEPAN?



IFDHAL KASIM  
BOARD AJAR  
DAN  
KETUA KOMNASHAM 2007-2012

## 4 KOMITMEN PRESIDEN

- MENGHAPUS IMPUNITAS DI SISTEM HUKUM NASIONAL.
- PENGHORMATAN HAM DAN PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT DI MASA LALU
- MENYELESAIKAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT DI MASA LALU YANG SAAT INI MENJADI BEBAN SOSIAL POLITIK BANGSA INDONESIA

## 1. KONTEKS

→ KENAPA MUNCUL ?

LADA GELOMBANG PADA NEGARA YANG DIPIMPIN JUNTA MILITER TOTALITER, DITAKTOR MILITER, MENUNTUT PARTISIPASI POLITIK GELOMBANG DEMOKRATISASI

## 2.

INTERVAL WAKTU TRANSISI MUNCUL ISU: PERTANGGUNG JAWABAN PEMERINTAH YANG MELANGGAR HAM?



## 3



## APA YANG SUDAH?

- AWAL REFORMASI MASY SIDIL MENDORONG PEMBUKAAN MASALAH
- UPAYA PENYELESAIAN KASUS KORUPSI DAN NEPOTISME
- ADA PROGRES KELEMBAGAAN DITERIMA

## MASA GUS DUR

- WIRANTO DITARIK DARI JABATAN
- PENGADILAN TIMOR TIMUR.

## MASA MEGAWATI

- PENGADILAN HAM TIMOR TIMUR
- PENGADILAN HAM TANJUNG PRIOK

## MASA SBY

- SBY MENGULUR WAKTU MEMBENTUK KOMISI KEBENARAN SEHINGGA MK MEMBATALKAN UNDANG-UNDANG

## MASA JOKOWI

- MENURUN PELAKSANAANNYA
- ADA KOMITMEN POLITIK



# PENUTUP

Materi ini dirangkum dari Kursus Online HAM dan Keadilan Transisi  
30 Juni-13 Juli 2020



2020

